

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang dengan ijin-Nya sehingga penyusunan kajian tentang “Strategi Penanggulangan Kemiskinan Berdasarkan Kultur Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara” telah dapat diselesaikan dengan tepat pada waktunya.

Semoga dengan adanya kajian ini dapat menjadi masukan dalam menanggulangi kemiskinan kultural khususnya yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang terkait yang telah membantu dalam proses penyusunan kajian ini. Kami menyadari hasil kajian ini masih jauh dari sempurna, yang tentu saja menuntut kajian yang lebih mendalam lagi.

Amuntai, Nopember 2018

Penyusun,

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud	4
1.3. Tujuan	4
1.4. Saran	5
1.5. Manfaat	5
1.6. Keluaran (Ourput).....	5
1.7. Mekanisme Pelaksanaan Pekerjaan	5

BAB II. KAJIAN LITERATUR

2.1. Siklus Kemiskinan	10
2.2. Pengukuran Kemiskinan	12
2.3. Pengukuran Kemiskinan oleh Badan Pusat Statistik (BPS)	14
2.4. Ketimpangan dan Distribusi Pendapatan	17
2.5. Program Penanggulangan Kemiskinan	18
2.6. Kemiskinan Kultural.....	20

BAB III. PEMBANGUNAN EKONOMI DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

3.1. Bidang Pendidikan.....	23
3.2. Bidang Kesehatan	32
3.3. Bidang Ekonomi	36
3.3.1. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	36
3.3.2. Pertumbuhan Ekonomi.....	37
3.3.3. Kebutuhan Hidup Layak.....	40
3.3.4. Tingkat Ketergantungan Penduduk.....	41
3.3.5. Indeks Gini.....	42

BAB IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Rasio Ketergantungan Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara	42
Tabel 5.1. Program dan Indikator Program dalam RPJMD yang Mendukung Penanggulangan Kemiskinan Kultural Berdasarkan Pembagian Kluster .	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Siklus Kemiskinan dari Sisi Pendapatan	11
Gambar 2.2. Siklus Kemiskinan dari Sisi Konsumsi	11
Gambar 2.3. Siklus Kemiskinan dari Sisi Tabungan.....	12
Gambar 3.1. Perkembangan Nilai APM di Provinsi Kalsel dan Kabupaten Hulu Sungai Utara.....	24
Gambar 3.2. Perkembangan Nilai APM di Provinsi Kalsel dan Kabupaten Hulu Sungai Utara.....	27
Gambar 3.3. Perbandingan Nilai IPM Kabupaten Hulu sungai Utara dan Nilai IPM Provinsi Kalimantan Selatan (2010-2017)	29
Gambar 3.4. Perbandingan Nilai Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Nilai AHH Provinsi Kalimantan Selatan (2010-2017)	32
Gambar 3.5. Nilai PDRB Konstan (2010) Kabupaten Hulu Sungai Utara 2001-2016	37
Gambar 3.6. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi (Konstan =2010) Kabupaten Hulu Sungai Utara 2002 – 2016.....	38
Gambar 3.7. Perkembangan KHL di Kabupaten HSU	40
Gambar 3.8. Perkembangan Indeks Gini di Kabupaten Hulu Sungai Utara	43
Gambar 4.1. Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara ..	46
Gambar 4.2. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara (2002-2017).....	48
Gambar 4.3. Perkembangan Tingkat Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara 2002-2017.....	50
Gambar 4.4. Tingkat Pendidikan Responden Survey Kemiskinan Kultural	53
Gambar 4.5. Persepsi Terkait Kepuasan Terhadap Pekerjaan Sekarang	54
Gambar 4.6. Upaya Untuk Mengubah Kehidupan yang Lebih Baik	55
Gambar 4.7. Keinginan untuk Mengikuti Pelatihan atau Pendidikan Sekolah	56
Gambar 4.8. Keinginan untuk Mengikuti Pelatihan atau Pendidikan Sekolah	57
Gambar 5.1. Formulasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Berdasarkan Kultur Masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara.....	61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Bangsa Indonesia memiliki cita-cita yang harus diwujudkan demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Cita-cita Bangsa Indonesia telah termaktub dalam Pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat seperti yang telah dicita-citakan dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut, Pemerintah Indonesia membuat beberapa kebijakan dan program-program kesejahteraan. Salah satu program yang diupayakan saat ini adalah program penanggulangan kemiskinan dan penurunan ketimpangan pendapatan. Program penanggulangan kemiskinan mulai gencar dilaksanakan sejak masa orde baru. Program penanggulangan kemiskinan tersebut telah dijalankan oleh Pemerintah Indonesia secara bertahap.

Tingkat kemiskinan di Indonesia dapat dikategorikan cukup tinggi. Secara rata-rata tingkat kemiskinan di Indonesia adalah 9,82 persen pada bulan Maret 2018 (BPS, 2018). Meskipun demikian angka ini merupakan angka terendah dari data tingkat kemiskinan Indonesia yang ada selama ini. Selama beberapa dekade terakhir tingkat kemiskinan di Indonesia terus menerus mengalami penurunan. Idealnya, angka kemiskinan adalah sebesar 0 (nol) persen. Namun, hal ini tidak mudah dicapai, maka dari itu upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Indonesia khususnya adalah meminimalkan tingkat kemiskinan dan mengurangi jumlah penduduk miskin dari tahun ke tahun. Dengan pentingnya upaya penurunan tingkat kemiskinan, maka pengurangan jumlah penduduk miskin dunia menjadi salah satu kesepakatan global yang dinyatakan dalam Tujuan Pembangunan Milenium (*Millenium Development Goals*) yang harus dicapai secara signifikan.

Salah satu tujuan dari pembangunan ekonomi baik di daerah maupun nasional adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Selanjutnya, pengurangan tingkat kemiskinan diharapkan dapat tercapai melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata. Masalah kemiskinan merupakan permasalahan utama yang memerlukan penanganan khusus dalam proses pembangunan baik dalam tingkat nasional maupun tingkat daerah.

Permasalahan dan karakteristik kemiskinan di negara sedang berkembang pada umumnya, dan di Indonesia pada khususnya bersifat multi dimensi dan multi sektor selama periode waktu yang cukup panjang. Dengan demikian pemerintah harus berupaya keras untuk mengentaskan dan menanggulangi kemiskinan yang terjadi selama ini. Upaya penurunan tingkat kemiskinan dapat dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak secara aktif dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Hal ini merupakan komitmen Pemerintah Indonesia dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (*Millenium Development Goals*).

Dukungan terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (*Millenium Development Goals*) telah memotivasi kebijakan pembangunan di Indonesia baik di pusat maupun daerah mulai diprioritaskan terhadap program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan. Dengan adanya kompleksitas dan keragaman dari dimensi-dimensi kemiskinan yang ada, maka dapat diketahui bahwa penyebab kemiskinan antara daerah satu dengan daerah lainnya dapat menjadi sangat berbeda. Oleh karena itu, program penanggulangan kemiskinan perlu dirancang terlebih dahulu oleh pemerintah sebelum melakukan implementasi program. Pemerintah daerah dapat menjadi pelaku strategis dalam upaya penanggulangan kemiskinan di wilayahnya secara langsung.

Permasalahan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi juga dialami oleh Kabupaten Hulu Sungai Utara yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan. Permasalahan tingginya tingkat kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara juga dapat dikarenakan letak geografis Kabupaten Hulu Sungai Utara yang didominasi oleh tanah rawa sehingga memerlukan perlakuan khusus dalam pengoptimalan tanah rawa. Perlakuan khusus ini tentu memerlukan biaya yang cukup tinggi, sehingga permasalahan kemiskinan yang ada dapat menjadi semakin memburuk jika tidak memperoleh penanganan yang baik dan serius.

Kondisi geografis yang didominasi oleh tanah rawa ini juga dapat menyebabkan pembangunan dan perawatan infrastruktur memerlukan biaya relatif

mahal dibandingkan daerah lain yang kondisi geografisnya didominasi oleh lahan kering. Penyebab kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara juga terletak pada permasalahan Sumber Daya Manusia (SDM). Apabila dilihat dari nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM), maka dapat diketahui bahwa pada tahun 2017 Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki nilai IPM yang paling rendah dibanding kabupaten lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2017 mencapai angka 64,21, yang masih berada di bawah nilai IPM Provinsi Kalimantan Selatan yaitu sebesar 69,65. Selain itu, permasalahan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi di Kabupaten Hulu Sungai Utara ini dapat dikarenakan karena kemiskinan kultural yang tidak mudah dihilangkan dalam jangka pendek.

Pada tahun 2016 tingkat kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebesar 6,76%. Angka ini masih di atas lebih tinggi dari tingkat kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan (4,52 %). Pada tahun 2017 tingkat kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara mengalami penurunan menjadi sebesar 6,65%. Namun, angka ini merupakan angka tertinggi dari tingkat kemiskinan yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara dikategorikan cukup tinggi. Maka dari itu, pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara memerlukan upaya dan langkah yang perlu dilakukan secara menyeluruh, bertahap, berkesinambungan dan terencana dengan baik.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017-2022 disebutkan bahwa permasalahan yang berkaitan dengan sosial antara lain adalah: jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang masih besar dengan permasalahan yang semakin kompleks, penanganan rumah tangga miskin *by name* dan *by address* yang belum optimal serta adanya ketidaktepatan sasaran program penanggulangan kemiskinan.

Program penanggulangan kemiskinan ini tentu dapat tercapai dengan lebih baik jika terdapat keterlibatan banyak pihak baik Pemerintah Daerah, dunia usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan organisasi kemasyarakatan maupun masyarakat miskin sendiri. Penyebab kemiskinan dapat dilihat dari dua perspektif utama yaitu kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Karena sifatnya maka pengentasan kemiskinan kultural menjadi relatif lebih sulit dibandingkan pengentasan kemiskinan struktural.

Penelitian ini berupaya mengidentifikasi eksistensi dari kemiskinan kultural yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara khususnya. Hal ini dikarenakan kemiskinan kultural memerlukan penanganan program penanggulangan kemiskinan yang relatif lebih intensif dan berkesinambungan dibandingkan kemiskinan struktural. Untuk selanjutnya laporan ini berupaya untuk membahas formulasi kebijakan yang dapat dilakukan untuk menanggulangi dan mengentaskan permasalahan kemiskinan kultural yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara khususnya. Kajian ini merupakan pengembangan dari kajian sebelumnya yang berjudul “Identifikasi Kultur Kemiskinan Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara”. Kajian ini khusus dilakukan untuk mengidentifikasi formulasi kebijakan penanggulangan kemiskinan kultural yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

1.2. MAKSUD

Maksud dari Kajian “Strategi Penanggulangan Kemiskinan Berdasarkan Kultur Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara” adalah untuk melakukan kajian, analisis dalam upaya memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi tentang pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan kultural khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Utara sehingga dapat berkontribusi dalam upaya memecahkan permasalahan terkait kemiskinan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Utara 2017-2022.

1.3. TUJUAN

Tujuan Kajian “Strategi Penanggulangan Kemiskinan Berdasarkan Kultur Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara” adalah:

- a) Untuk mengidentifikasi kondisi kemiskinan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara pada periode terkini
- b) Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan eksistensi kemiskinan kultural pada masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- c) Untuk mengidentifikasi kebijakan yang dapat diprioritaskan dalam penanggulangan kemiskinan kultural khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

1.4. SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai dari Kajian “Strategi Penanggulangan Kemiskinan Berdasarkan Kultur Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara” adalah:

- a) Tersusunnya analisis kondisi kemiskinan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara
- b) Tersusunnya informasi dan identifikasi kemiskinan kultural pada masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- c) Tersusunnya kebijakan prioritas yang dapat diformulasikan dalam upaya penanggulangan dan pengentasan kemiskinan kultural di Kabupaten Hulu Sungai Utara khususnya.

1.5. MANFAAT

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penyusunan program-program penanggulangan kemiskinan kultural di Kabupaten Hulu Sungai Utara khususnya.

1.6. KELUARAN (OUTPUT)

Keluaran yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini berupa dokumen atau buku yang berisikan “Strategi Penanggulangan Kemiskinan Berdasarkan Kultur Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara”.

1.7. MEKANISME PELAKSANAAN PEKERJAAN

Mekanisme pelaksanaan tahapan pekerjaan dalam penyusunan kajian “Strategi Penanggulangan Kemiskinan Berdasarkan Kultur Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara” terdiri dari 4 (empat) tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap pengumpulan data, tahap kompilasi dan analisa data, serta tahap finalisasi.

1) Tahapan Persiapan

Tahap persiapan meliputi kegiatan penentuan metode pelaksanaan, rencana kerja, jadwal pelaksanaan kegiatan, studi literatur, dan kajian wilayah. Pada tahap

persiapan ini fokus utama kegiatan ini adalah menghasilkan draft laporan pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang dan arah kajian, studi literatur, gambaran umum wilayah dan perkembangan pembangunan daerah, dan metode penelitian.

Latar belakang kajian dalam bab pendahuluan akan mengacu pada latar belakang dan tujuan penelitian sebagaimana yang tertuang dalam KAK. Sedangkan, studi literatur akan membahas berbagai macam teori dan konsep berkaitan dengan kemiskinan dan kultur kemiskinan. Selanjutnya, pembahasan dilanjutkan dengan penjelasan mengenai gambaran umum wilayah dan perkembangan pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Utara minimal selama beberapa tahun.

2) Tahapan Pembuatan Kajian Literatur dan Pengumpulan Data

Di dalam KAK, dijelaskan bahwa metode pengumpulan data meliputi pengumpulan data primer dan sekunder. Data sekunder kajian ini berasal dari data-data di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dapat diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Hulu Sungai Utara dan sumber lainnya. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa data ekonomi dan sosial. Selain itu kajian ini akan diawali dengan pembahasan terkait hasil identifikasi dari hasil kajian sebelumnya yang berjudul “Identifikasi Kultur Kemiskinan Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara”.

3) Tahap Kompilasi dan Analisis Data

Data yang telah diperoleh dari hasil survey dan pengumpulan data sekunder dari dokumen statistik daerah, kemudian dikompilasi dan dianalisis. Alat analisis data yang digunakan dalam kajian ini menyesuaikan dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan dalam KAK. Terdapat 4 tujuan penelitian, yaitu:

- a. Untuk mengidentifikasi kondisi kemiskinan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara
- b. Untuk mengidentifikasi eksistensi kultur kemiskinan di masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- c. Untuk menjelaskan kultur kemiskinan pada masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara

- d. Untuk memformulasikan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara khususnya kemiskinan yang diakibatkan oleh kultur kemiskinan.

4) Tahapan Finalisasi

Tahap finalisasi adalah tahap yang mana pelaksanaan kajian telah memasuki tahap uji hasil kajian dan finalisasi laporan akhir kajian.

BAB II

KAJIAN LITERATUR

Salah satu permasalahan pembangunan ekonomi di negara sedang berkembang adalah upaya penanggulangan kemiskinan (Todaro & Smith, 2012). Sebuah kondisi yang mana suatu masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dapat diartikan sebagai kemiskinan. Kebutuhan manusia yang beraneka ragam menyebabkan kemiskinan bersifat multidimensional. Hal ini berarti bahwa kebutuhan manusia yang bermacam-macam ini akan menghasilkan jenis kemiskinan yang memiliki banyak aspek dan beragam. Jenis kemiskinan dapat dilihat dari aspek primer maupun aspek sekunder. Aspek primer meliputi sebuah kondisi yang miskin terhadap pengetahuan, pendidikan, keterampilan, dan miskin aset. Aspek sekunder meliputi sebuah kondisi yang miskin terhadap organisasi sosial/politik, akses terhadap sumber-sumber keuangan dan miskin terhadap informasi. Arsyad (2010) menyatakan bahwa dimensi-dimensi kemiskinan tersebut tercerminkan dalam bentuk kekurangan gizi, air kurang bersih, perumahan yang kurang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah.

Kemiskinan merupakan suatu kondisi kekurangan, yaitu kekurangan dalam pendapatan serta kekurangan dalam dimensi lain seperti kesehatan, nutrisi dan sanitasi (Abraham dan Kumar, 2008). Menurut Haughton dan Khandker (2009), yang dimaksud orang miskin adalah individu atau rumah tangga yang tidak dapat memenuhi batas kebutuhan minimumnya karena tidak memiliki pendapatan yang cukup atau konsumsi yang cukup. Haughton dan Khandker (2009) menambahkan bahwa apabila sebuah keluarga atau individu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya yang berupa sandang, pangan dan papan maka dapat dianggap sebagai orang miskin atau rumah tangga miskin.

Secara umum kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi yang mana individu atau rumah tangga tidak mampu memenuhi standar kehidupan yang dianggap manusiawi. Kemiskinan merupakan kondisi kekurangan yang mana individu atau rumah tangga mengalami kondisi kekurangan pendapatan dan kekurangan dalam dimensi yang lain yaitu kekurangan dalam hal kesehatan, nutrisi, dan sanitasi. Asselin (2009) menyatakan bahwa kondisi kekurangan ini dapat berdampak pada kemampuan

individu, rumah tangga dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya yang terbagi dalam beberapa dimensi yaitu pendapatan, pendidikan, kesehatan, makanan, nutrisi, akses terhadap sanitasi dan kualitas air yang baik, pekerjaan, perumahan, akses terhadap aset produktif, akses terhadap pasar, dan partisipasi sosial.

Teori Lewis mengungkapkan bahwa terdapat pergeseran tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri dan manufaktur. Hal ini menyebabkan kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di beberapa daerah khususnya di Indonesia menjadi semakin rendah. Akibatnya, kemiskinan di sektor pertanian cenderung lebih tinggi dibandingkan sektor-sektor lainnya di Indonesia. Penyebab kemiskinan yang cenderung lebih tinggi di sektor pertanian dibandingkan sektor-sektor lainnya antara lain adalah (Arsyad, 2016):

- 1) distribusi lahan yang semakin timpang
- 2) rendahnya tingkat pendidikan petani
- 3) rendahnya aksesibilitas petani terhadap modal

Ketimpangan distribusi lahan dapat menyebabkan produktivitas lahan pertanian mengalami penurunan. Sebagaimana diketahui bahwa pertanian di Indonesia didominasi oleh petani skala kecil. Hal ini menyebabkan kemiskinan banyak dialami oleh kaum petani. Kaum petani khususnya petani berskala kecil juga memiliki aksesibilitas terhadap modal yang cukup rendah. Salah satu faktor penyebab rendahnya aksesibilitas petani terhadap modal adalah kurang memiliki informasi yang menyeluruh terkait kredit, adanya keterbatasan birokrasi bagi petani, dan kurang memiliki agunan yang layak, sehingga menyebabkan kaum petani sulit mengakses kredit.

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi kehidupan yang sangat kompleks. Kemiskinan juga memiliki hubungan dengan ketimpangan. Pengetahuan dan pemahaman terhadap definisi kemiskinan, dan konteks kemiskinan dapat membantu upaya penanggulangan kemiskinan. Identifikasi terhadap sebab-sebab kemiskinan dan pemahaman terkait program penanggulangan kemiskinan diharapkan mampu menciptakan suatu formulasi kebijakan yang komprehensif dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan.

Adanya permasalahan kemiskinan di Indonesia mendorong pemerintah Indonesia untuk membuat sebuah aturan teknis operasional dalam penanggulangan kemiskinan. Dalam upaya mencapai Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals) maka Pemerintah mengatur teknis operasional dalam Perpres

No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Tujuan Perpres No. 15 Tahun 2010 adalah untuk meningkatkan efektifitas upaya pemerintah bersama-sama dengan masyarakat dan sektor swasta dalam program penanggulangan kemiskinan. Dalam Perpres tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan tersebut diatur empat pokok strategi yaitu perbaikan program perlindungan sosial, peningkatan akses terhadap pelayanan dasar, pemberdayaan kelompok masyarakat miskin, dan pembangunan inklusif, yang dilaksanakan sesuai dengan kondisi daerah.

2.1. Siklus Kemiskinan

Kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan ketimpangan pendapatan memiliki keterkaitan (Arndt, Hussain, Jones, Nhate, Tarp, & Thurlow (2012); Spencer-Wood & Matthews, 2011). Chandhoke (2012) juga mengungkapkan hal yang sama yaitu adanya keterkaitan antara kemiskinan dan tingkat ketimpangan pendapatan. Kemiskinan pada suatu individu atau kelompok masyarakat dapat dikarenakan individu atau kelompok masyarakat tersebut berada dalam suatu siklus yang menyebabkan berada pada kondisi miskin (Todaro & Smith, 2012). Jika dianalisis terdapat tiga siklus kehidupan yang dapat menyebabkan individu atau kelompok masyarakat berada pada kondisi miskin.

Siklus yang pertama terjadi jika siklus kemiskinan dilihat dari perspektif tingkat pendapatan yang rendah. Masyarakat miskin biasanya memiliki pendapatan yang rendah. Pendapatannya yang rendah dapat menyebabkan masyarakat miskin memiliki daya beli yang rendah untuk mendapatkan pendidikan, keahlian, dan informasi. Akibat yang ditimbulkan yaitu si miskin hanya mendapatkan tingkat pengetahuan yang juga rendah. Dikarenakan si miskin memiliki tingkat pengetahuan yang rendah maka produktifitas yang dihasilkan juga akan rendah. Hal ini menyebabkan individu atau kelompok masyarakat tersebut akan menjadi tetap miskin. Siklus ini akan terus berputar, sampai dengan terdapat suatu kondisi yang dapat memotong siklus tersebut sehingga si miskin dapat merubah kehidupannya yaitu menjadi tidak miskin kembali atau setidaknya memiliki tingkat kehidupan yang lebih baik.

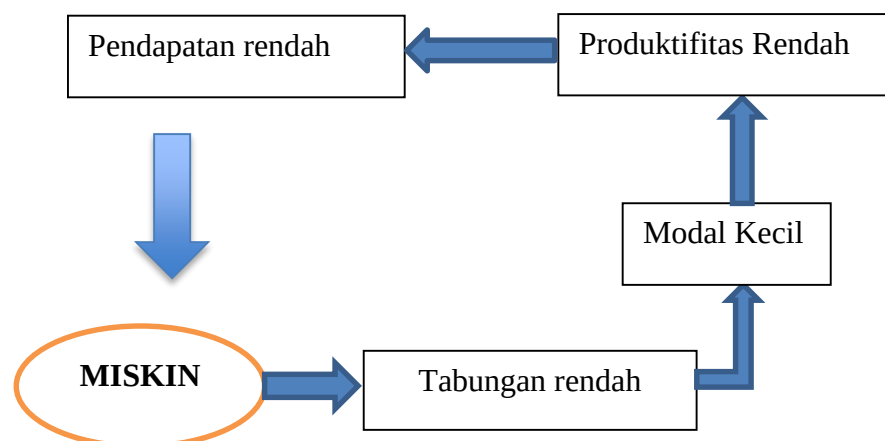


```
graph TD; K_Rendah[Kinerja Rendah] --> P_Rendah[Produksi Rendah]; P_Rendah --> MISKIN((MISKIN)); MISKIN --> K_Rendah; MISKIN --> Konsumsi_rendah[Konsumsi rendah]; K_Rendah --> Kesehatan_Rendah[Kesehatan Rendah]; Kesehatan_Rendah --> Status_gizi_rendah[Status gizi rendah]; Status_gizi_rendah --> Konsumsi_rendah;
```

11

Tingkat produktifitas yang rendah menyebabkan individu atau kelompok masyarakat tersebut berada dalam kondisi tetap miskin. Siklus ini akan terus berulang sampai dengan ada suatu kondisi yang dapat memotong siklus tersebut sehingga si miskin dapat berubah menuju pada kondisi kesejahteraan yang lebih baik.

Siklus yang ketiga terjadi jika siklus kemiskinan dilihat dari perspektif kepemilikan tabungan yang mana individu miskin atau suatu kelompok masyarakat miskin cenderung memiliki tabungan yang rendah. Tabungan yang rendah menyebabkan si miskin memiliki modal kecil yang dapat digunakan untuk usaha atau melakukan aktivitas perekonomian. Secara umum modal yang rendah mengakibatkan tingkat produktivitas rendah sehingga produksi yang dihasilkan juga rendah. Tingkat produksi yang rendah akan menyebabkan tingkat pendapatan yang dihasilkan juga rendah. Sehingga, individu atau kelompok masyarakat tersebut akan tetap menjadi miskin. Siklus ini akan terus berputar, sampai dengan terdapat suatu kondisi yang dapat memotong siklus tersebut sehingga si miskin dapat berubah atau menuju ke tingkat kesejahteraan yang lebih baik.



Gambar 2.3. Siklus Kemiskinan dari Sisi Tabungan

2.2. Pengukuran Kemiskinan

Haughton & Khandker (2009) menjelaskan bahwa pendekatan kemiskinan secara menyeluruh berfokus pada kapabilitas individu terhadap fungsinya dalam masyarakat. Orang miskin secara umum kurang memiliki kapabilitas. Orang miskin tidak memiliki tingkat pendapatan, pendidikan, kesehatan yang cukup, serta kurang

memiliki kebebasan politik. Dengan demikian pengukuran kemiskinan penting untuk dilakukan. Haughton & Khandker (2009) menjelaskan bahwa terdapat empat alasan untuk mengukur kemiskinan, yaitu:

- 1) Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu agenda dalam pembangunan
- 2) Untuk mengidentifikasi individu atau kelompok masyarakat miskin sehingga target dari intervensi kebijakan yang *pro poor* dapat tercapai
- 3) Untuk melakukan monitor dan evaluasi atas intervensi kebijakan dalam program pengentasan kemiskinan
- 4) Untuk melakukan evaluasi atas efektifitas kelembagaan yang menjalankan program pengentasan kemiskinan

Kemiskinan tidak hanya diukur dari tingkat pendapatan tetapi juga mengukur tingkat kerentanan (*vulnerability*) atau kerawanan individu atau kelompok masyarakat untuk menjadi miskin. Yang dimaksud penduduk rentan adalah penduduk yang tingkat pengeluarannya berada relatif sedikit lebih tinggi dari garis kemiskinan. Penduduk kategori ini rentan dengan adanya *shock* dalam perekonomiannya. *Shock* perekonomian seperti banjir, gagal panen, adanya anggota keluarga yang sakit terutama kepala keluarga, dan sejenisnya dapat menyebabkan penduduk rentan ini menjadi miskin.

Pengukuran kemiskinan dapat dilakukan secara metode kuantitatif maupun kualitatif. Indikator kuantitatif dari kemiskinan antara lain adalah tingkat pendapatan rumah tangga, tingkat konsumsi rumah tangga, dan lain sebagainya. Sedangkan indikator kualitatif antara lain adalah tingkat pendidikan, kondisi rumah yang dihuni, kondisi sanitasi rumah tangga, dan lain sebagainya.

Langkah utama untuk mengukur kemiskinan adalah mendefinisikan sebuah indikator kesejahteraan seperti pendapatan per kapita atau konsumsi per kapita. Secara prinsipnya pendapatan adalah konsumsi ditambah dengan perubahan dalam kekayaan suatu individu. Sebagaimana telah dijelaskan dalam *permanent income hypothesis* konsumsi dapat mengukur pendapatan permanen. Karena, konsumsi suatu individu dipengaruhi oleh pendapatan permanennya. Oleh karena itu pengukuran kesejahteraan melalui nilai konsumsinya adalah layak dilakukan.

Menurut Ravallion (1998), terdapat tiga langkah untuk mengukur kemiskinan. Pertama, seperti telah dijelaskan sebelumnya yaitu mendefinisikan sebuah indikator kesejahteraan. Kedua, menetapkan standar minimum kehidupan individu, yaitu

kebutuhan minimal seorang individu yang harus dipenuhi, selanjutnya disebut garis kemiskinan. Ketiga adalah membuat deskripsi data sebagai informasi agregat dari garis kemiskinan suatu masyarakat yang menjadi kajian.

Sebagaimana dijelaskan bahwa kemiskinan bersifat multidimensi, maka Sumodiningrat (1999) mengklasifikasikan kemiskinan di Indonesia adalah sebagai berikut.

- 1) Kemiskinan absolut, yaitu kemiskinan yang terjadi jika tingkat pendapatan seseorang berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup memenuhi kebutuhan minimum
- 2) Kemiskinan relatif, yaitu kemiskinan yang terjadi jika seseorang memiliki penghasilan di atas garis kemiskinan namun relatif lebih rendah dibanding pendapatan masyarakat sekitarnya
- 3) Kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang mengacu pada sikap seseorang yang 'tidak mau berusaha (faktor budaya)'
- 4) Kemiskinan kronis, yaitu kemiskinan yang terjadi karena suatu kondisi sosial budaya yang mendorong untuk tidak produktif, keterbatasan sumber daya, rendahnya taraf pendidikan dan tingkat kesehatan
- 5) Kemiskinan sementara, yaitu kemiskinan yang terjadi karena adanya *shock* perekonomian sehingga sifatnya adalah sementara misalnya terjadi bencana alam yang dapat mengganggu perekonomian masyarakat, gagal panen, dan lainnya.

Cara sederhana untuk mengukur jumlah kemiskinan adalah dengan menghitung jumlah kemiskinan dengan menghitung jumlah orang miskin sebagai proporsi dari populasi. Cara yang lazim disebut dengan *Head Count Index* ini sangat bermanfaat meskipun indikator ini sering dikritik karena mengabaikan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Meier (1995) mengatakan bahwa untuk mengatasi kelemahan *Head Count Index* dapat digunakan dengan ukuran kesenjangan kemiskinan pendapatan atau *poverty gap*.

2.3. Pengukuran Kemiskinan oleh Badan Pusat Statistik (BPS)

Dalam mengukur tingkat kemiskinan BPS menggunakan dua macam pendekatan yaitu pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*) dan pendekatan *Head Count Index*. Kuncoro (2006) menyatakan bahwa pendekatan kebutuhan dasar

merupakan pendekatan yang sering digunakan untuk mengukur kemiskinan. Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan batas miskin dari besarnya rupiah yang dibelanjakan per kapita sebulan untuk memenuhi kebutuhan makanan, minuman dan bukan makanan. Untuk kebutuhan minuman dan makanan digunakan patokan 2100 kalori per hari. Pengeluaran kebutuhan bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, sandang, serta aneka barang dan jasa.

Dalam mengidentifikasi tercapainya tujuan upaya penanggulangan kemiskinan maka tingkat kemiskinan perlu diukur. Cara sederhana untuk mengukur tingkat kemiskinan adalah dengan menghitung jumlah orang miskin dalam sebuah populasi. Apabila jumlah orang miskin dirasioikan dengan jumlah populasi maka dapat disebut sebagai persentase kemiskinan, yang mana jumlah orang miskin sebagai proporsi dari populasi. Cara ini dikenal sebagai metode *Head Count Index*. Cara ini sangat bermanfaat meskipun indikator ini sering dikritik karena mengabaikan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Meier (1995) mengatakan bahwa untuk mengatasi kelemahan *Head Count Index* dapat digunakan dengan ukuran kesenjangan kemiskinan pendapatan atau *poverty gap*.

Kemiskinan setidaknya dapat dilihat dari dua sisi, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif.

1. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut menggunakan pendekatan dengan mengidentifikasi jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan tertentu. Konsep kemiskinan absolut ini sering dikaitkan dengan sebuah perkiraan atas tingkat pendapatan dan kebutuhan. Perkiraan atas tingkat kebutuhan biasanya hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk dapat hidup secara layak. Jika pendapatan tidak dapat mencapai kebutuhan minimum maka orang dapat dikatakan miskin. Tingkat pendapatan minimum yang merupakan pembatas antara keadaan miskin dan tidak miskin sering disebut sebagai garis batas kemiskinan.

2. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif merupakan pangsa pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing golongan pendapatan. Dapat dikatakan bahwa kemiskinan relatif sangat erat kaitannya dengan distribusi pendapatan. Berdasarkan konsep ini, garis kemiskinan akan mengalami perubahan jika

tingkat hidup masyarakatnya berubah. Ini merupakan perbaikan dari konsep kemiskinan absolut. Konsep kemiskinan relatif bersifat dinamis, sehingga kemiskinan akan selalu ada. Semakin besar ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan bawah, maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dapat dikategorikan miskin.

Haughton dan Khandker (2009) menjelaskan pengukuran dan analisis tentang tingkat kemiskinan terbagi dalam beberapa indeks terkait kemiskinan yaitu:

- a) Headcount Index, yaitu indeks yang mengukur proporsi penduduk miskin dibandingkan dengan keseluruhan populasi di suatu daerah, dalam hal ini adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Adapun formulanya adalah sebagai berikut:

$$P_0 = N_p/N, \text{ yang mana:}$$

P_0 : *headcount index*

N_p : jumlah populasi yang terkategori miskin

N : jumlah seluruh populasi.

Jumlah populasi yang terkategori miskin yaitu mereka yang memiliki nilai pembelanjaan lebih rendah daripada garis kemiskinan.

- b) Indeks kedalaman kemiskinan (poverty depth index)

Indeks ini merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks kesenjangan kemiskinan adalah untuk melihat bagaimana kesenjangan kemiskinan suatu daerah/ wilayah. Maka, semakin tinggi nilai indeks kesenjangan kemiskinan artinya semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Adapun formula dari indeks ini adalah sebagai berikut:

$$G_i = (z - y_i) \times N_p$$

$$P_1 = \frac{\sum(G_i/Z)}{N}, \text{ yang mana:}$$

z : garis kemiskinan (*poverty line*)

G_i : *poverty gap*,

P_1 : Indeks kedalaman kemiskinan (*poverty gap index*)

- c) Indeks Keparahan Kemiskinan (poverty severity index)

Indeks ini memberikan informasi tentang penyebaran pendapatan (pengeluaran) di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks ini artinya semakin tinggi

ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Adapun formulanya mirip dengan indeks kedalaman kemiskinan adalah sebagai berikut.

$$P_2 = \frac{1}{N} \sum \left(\frac{G_i}{Z} \right)^2$$

Dari formula di atas dapat disimpulkan bahwa indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan lebih memberikan informasi yang lebih komprehensif dibandingkan *headcount index*. Meski demikian, dalam mengidentifikasi kondisi kemiskinan perlu untuk menggunakan ketiga indeks tersebut.

2.4. Ketimpangan dan Distribusi Pendapatan

Salah satu cara mengukur kesenjangan ekonomi adalah melalui ketimpangan dan distribusi pendapatan. Cara untuk menganalisis distribusi pendapatan perorangan adalah menggunakan kurva Lorenz. Kurva Lorenz menunjukkan hubungan kuantitatif antara persentase penduduk dan persentase pendapatan yang diterima. Kurva Lorenz menggambarkan hubungan antara kelompok-kelompok penduduk dan pangsa (*share*) pendapatan mereka.

Semakin jauh kurva Lorenz tersebut dari garis diagonal (kemerataan sempurna), maka semakin tinggi pula derajat ketidakmerataan yang ditunjukkan. Keadaan yang paling ekstrim dari ketidakmerataan sempurna, misalnya keadaan di mana seluruh pendapatan hanya diterima oleh satu orang, akan ditunjukkan oleh berimpitnya kurva Lorenz tersebut dengan sumbu horizontal bagian bawah dan sumbu vertikal sebelah kanan.

Untuk melihat ketimpangan pendapatan penduduk, salah satu indikator yang sering dipakai adalah Indeks Gini. Indeks gini diperoleh melalui perbandingan antara luas daerah Kurva Lorenz dengan luas daerah di bawah garis diagonal. Secara matematis, untuk menghitung Indeks Gini dapat menggunakan persamaan berikut (Arsyad, 2016).

$$\text{Indeks Gini} = 1 - \sum_{i=1}^k f_i (Y_{i+1} + Y_i)$$

Keterangan:

f_i = Proporsi jumlah rumah tangga kumulatif kelas i

Y_i = Proporsi jumlah pendapatan rumah tangga kumulatif dalam kelas i

Nilai Indeks Gini berkisar antara nilai 0 (nol) sampai dengan 1 (satu). Apabila nilai Indeks Gini semakin mendekati nilai 1 maka dapat dikatakan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk mendekati ketimpangan sempurna. Sebaliknya, semakin mendekati 0 distribusi pendapatan penduduk semakin merata, atau mendekati pemerataan sempurna. Menurut Arsyad (2016), nilai Indeks Gini dibagi menjadi tiga tingkatan. Jika nilai Indeks Gini kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan “rendah”; nilainya antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan “moderat”; dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan “tinggi”.

Dari hasil penelitian di negara sedang berkembang, terutama di negara-negara yang mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang pesat, ditunjukkan adanya kecenderungan korelasi positif antara laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesenjangan ekonomi. Semakin tinggi pertumbuhan produk domestik bruto, atau semakin tinggi tingkat pendapatan per kapita, maka semakin besar perbedaan antara kaum miskin dan kaum kaya. Gottschalk & Danziger (1985), Northrop 1988) menyatakan bahwa salah satu cara dalam penurunan tingkat kemiskinan adalah melalui pencapaian pertumbuhan ekonomi. Ketimpangan lainnya yang terjadi di bidang non-ekonomi yaitu di bidang pendidikan, kesehatan serta akses terhadap sarana dan prasarana, kesenjangan terhadap akses infrastruktur, penerangan, air bersih, dan sanitasi. Salah satu penyebab rendahnya pertumbuhan pendapatan kelompok menengah ke bawah dan tingginya angka kemiskinan adalah kurangnya akses terhadap pelayanan dasar sehingga masyarakat tersebut menjadi kurang produktif.

2.5. Program Penanggulangan Kemiskinan

Kelompok rumah tangga yang diperkirakan berada pada 40 persen penduduk berpendapatan terbawah adalah:

- Usaha mikro kecil termasuk rumah tangga yang bekerja sebagai pekerja keluarga (*unpaid worker*),
- Angkatan kerja yang bekerja tidak penuh (*underutilized*) terdiri dari penduduk yang bekerja paruh waktu (*part time worker*), yang mana termasuk di dalamnya adalah rumah tangga nelayan, rumah tangga petani berlahan

sempit, rumah tangga sektor informal perkotaan, dan rumah tangga buruh perkotaan,

- Penduduk miskin yang tidak memiliki aset
- Penduduk miskin yang tidak memiliki pekerjaan.

Program penanggulangan kemiskinan yang selama ini telah dilakukan pemerintah antara lain adalah (Arsyad, 2016):

1. Membuka lapangan pekerjaan yang baru
2. Membantu perkembangan usaha kecil dan mikro agar dapat memiliki tumbuh kembang yang baik dengan memperluas akses keuangan.
3. Memberikan dukungan teknologi, informasi, dan pemasaran, selain permodalan kepada pengusaha kecil dan mikro
4. Mengembangkan ekonomi pedesaan serta sektor pertanian dengan meningkatkan sarana dan prasarana perekonomian di daerah pedesaan serta perluasan akses keuangan seperti kredit dan sumber permodalan lainnya
5. Memberikan penjaminan perlindungan sosial untuk seluruh pekerja terutama di sektor informal dan pertanian

Dalam upaya penurunan tingkat kemiskinan, selain implementasi program penanggulangan kemiskinan, diperlukan strategi penurunan tingkat kemiskinan antara lain yaitu: 1) Mengurangi nilai pengeluaran individu atau kelompok masyarakat miskin; 2) Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin melalui peningkatan kemampuan dalam aktifitas ekonomi; 3) Mengembangkan upaya keberlanjutan usaha kecil dan mikro; 4) memformulasikan sebuah sinergi antara kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan dengan meningkatkan kualitas dan produktivitas penduduk kelompok menengah ke bawah.

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan diperlukan beberapa langkah sebagai berikut:

2. Pengendalian inflasi khususnya bahan makanan
3. Peningkatan pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi, peningkatan produktifitas, perbaikan infrastruktur, peningkatan sumber daya manusia (SDM) pada pegawai negeri sipil, perbaikan sistem jaminan sosial, serta bantuan sosial

4. Melakukan evaluasi dan menetapkan prioritas dalam pengalokasian anggaran daerah.

Kemiskinan diawali dari sebuah kondisi ketidakberdayaan pada aspek ekonomi khususnya. Maka dari itu Ras (2013) menyimpulkan bahwa strategi yang dianggap paling tepat untuk mengurangi angka kemiskinan adalah melalui strategi pemberdayaan kepada masyarakat miskin. Ras (2013) menganggap bahwa melalui pemberdayaan, masyarakat dapat berpartisipasi mulai dari identifikasi kebutuhan, proses perencanaan, perumusan program sampai kepada evaluasi program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, budaya dan politik.

2.6. Kemiskinan Kultural

Identifikasi terhadap penyebab kemiskinan perlu dilakukan agar keberhasilan penanggulangan kemiskinan dapat tercapai dengan baik. Kemiskinan dapat disebabkan oleh dua faktor penting yaitu kemiskinan karena faktor struktural dan kemiskinan karena faktor kultural atau budaya (Bradshaw, 2006). Penyebab kemiskinan secara kultural dapat diidentifikasi dari kondisi dan situasi yang dapat mempengaruhi sifat individu, keluarga, dan lingkungan.

Astika (2010) menyatakan bahwa kebudayaan kemiskinan merupakan adaptasi dan penyesuaian oleh sekelompok orang pada kondisi marginal mereka, tetapi bukan untuk eksistensinya karena sejumlah sifat dan sikap mereka lebih banyak terbatas pada orientasi kekinian dominannya sikap rendah diri, apatis, dan sempitnya pada perencanaan masa depan. Kemiskinan kultural dapat terjadi karena sistem budaya yang muncul dalam masyarakat. Kemiskinan kultural muncul disebabkan mentalitas yang miskin (*poor mentality*). Kultur kemiskinan dapat disebabkan oleh faktor jenis kelamin, ras, dan golongan (Branch & Schere, 2013).

Mentalitas miskin ini dapat berupa kurangnya tanggung jawab terutama atas diri sendiri, kurangnya motivasi untuk maju, dan perasaan suka bermalasan. Lebih lanjut Bradshaw (2006) berpendapat bahwa budaya kemiskinan dapat disebabkan oleh adanya diskriminasi baik di bidang sosial, ekonomi, maupun politik. Adanya diskriminasi dapat menyebabkan adanya ketidaksetaraan pendapatan, ketidaksetaraan gender, dan ras. Sehingga muncullah kemiskinan karena faktor budaya yakni mentalitas miskin. Dalam kondisi ini maka upaya penanggulangan kemiskinan dapat

dilakukan melalui penyempurnaan sistem penjaminan sosial (*social security system*), peningkatan akses masyarakat terutama masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat, dan proses pembangunan yang berkelanjutan. Sedangkan, upaya untuk mengatasi kemiskinan karena faktor budaya memerlukan proses yang cukup panjang.

Sikap mudah putus asa, hidup tanpa harapan merupakan sikap yang muncul karena budaya miskin. Budaya miskin juga dapat memunculkan sebuah kehidupan yang tidak memiliki strategi dalam meraih cita-cita yang diinginkan. Dengan demikian budaya miskin ini merupakan salah satu faktor penyebab munculnya kemiskinan. Dengan demikian, dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan maka budaya miskin ini perlu dihilangkan. Apabila budaya miskin tidak dihilangkan maka kemiskinan akan sulit dihilangkan dalam beberapa generasi. Budaya miskin ini dapat dikategorikan sebagai budaya atau nilai-nilai yang dianut oleh miskin pada umumnya yaitu tidak memiliki cita-cita, malas, dan mudah menyerah. Dalam upaya penurunan eksistensi kemiskinan kultural, salah satu solusinya adalah peningkatan partisipasi dan tingkat pendidikan masyarakat kategori miskin khususnya.

BAB III

PEMBANGUNAN EKONOMI DI KABUPATEN

HULU SUNGAI UTARA

Dalam proses pembangunan ekonomi, pemerintah berupaya menaikkan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang dengan disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan. Sektor pendidikan merupakan salah satu sektor yang menjadi sasaran pembangunan nasional. Keberhasilan pendidikan di suatu negara dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas merupakan salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan suatu negara. Peningkatan kualitas pendidikan juga diyakini sebagai suatu cara yang dapat memutus rantai kemiskinan karena dengan tingkat pendidikan yang baik diharapkan mampu memperoleh pekerjaan yang layak atau membuka lapangan pekerjaan sendiri sehingga mampu memenuhi standar kebutuhan hidup layak.

Prioritas pembangunan ekonomi terdiri dari beberapa sektor yaitu sektor pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat juga penting dalam upaya menunjang keberhasilan pembangunan ekonomi. Tolok ukur kinerja kesehatan yang paling utama yang sering digunakan adalah Angka Usia Harapan Hidup. Kesehatan merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Apabila suatu negara memiliki sumber daya manusia yang sehat maka diharapkan mampu memberikan produktivitas yang tinggi kepada pembangunan dan *multiplier effect* terhadap perekonomian.

Indikator terkait sektor ekonomi, pendidikan, dan kesehatan tercermin dalam indikator IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Dengan pentingnya faktor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi maka komposit penyusun indeks pembangunan manusia adalah sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang diukur dari pengeluaran riil per kapita. Indikator IPM adalah standar hidup layak masyarakatnya.

Komponen terkait perekonomian mencoba untuk memotret seberapa layak masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya berdasarkan pengeluaran per kapita yang dikeluarkan dibandingkan dengan tingkat kebutuhan minimal yang harus dipenuhi oleh masyarakat di suatu wilayah. Kombinasi ketiga komponen yaitu sektor perekonomian, pendidikan, dan kesehatan dapat menjadi tolok ukur keberhasilan suatu pemerintahan. Dengan kata lain bahwa nilai IPM yang tinggi mengindikasikan bahwa pembangunan yang dilakukan telah berhasil dengan baik, khususnya pembangunan manusia. Sub bab selanjutnya akan menjelaskan secara lebih detil perkembangan ketiga sektor, yaitu sektor pendidikan, sektor kesehatan, dan sektor perekonomian.

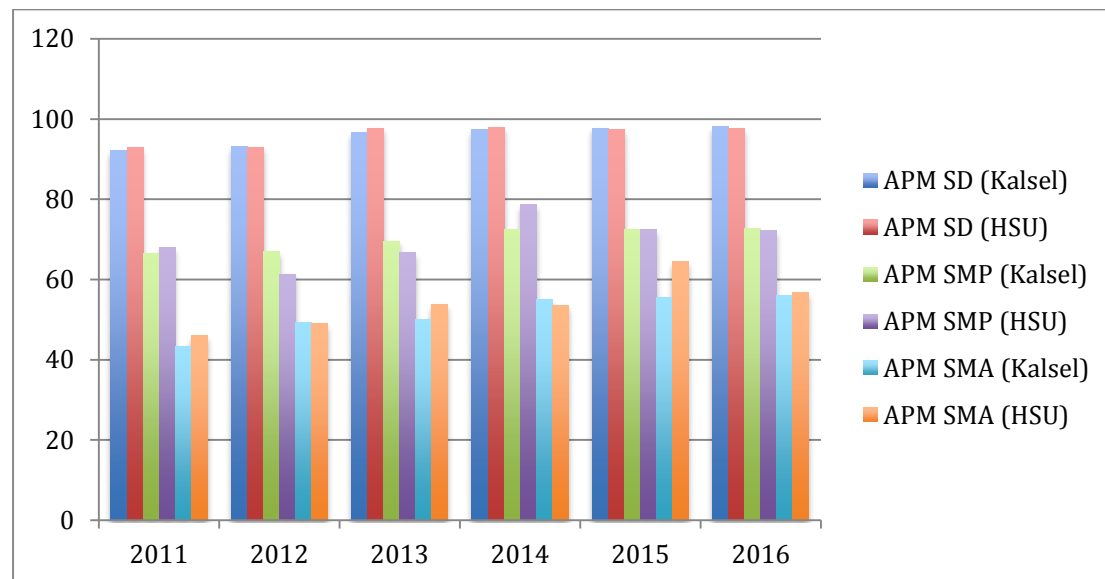
3.1. Bidang Pendidikan

Dalam upaya peningkatan pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Utara khususnya, tidaklah cukup hanya dengan mengandalkan program kegiatan yang sifatnya pembangunan fisik berupa sarana dan prasarana pendidikan, melainkan juga perlu adanya perhatian yang besar terhadap peningkatan mutu pendidikan masyarakat dengan tetap menjaga esensi pendidikan yaitu mencedaskan masyarakat. Masyarakat harus terus menerus disadarkan akan pentingnya pendidikan demi perbaikan masa depan keluarga dan bangsa.

Bidang pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan pembangunan, kemajuan suatu bangsa, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pemerintah daerah, indikator keberhasilan pembangunan daerah dapat dinilai dari kemajuan yang dicapai dalam bidang pendidikan yang nantinya tergambarkan dalam pencapaian IPM. Dalam penghitungan IPM, indikator bidang pendidikan direpresentasikan oleh pencapaian Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK).

Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan penduduk dengan usia sekolah yang terdaftar sekolah dibagi dengan jumlah seluruh penduduk usia sekolah (BPS, 2018). Dengan demikian APM Sekolah Dasar (SD) adalah perbandingan penduduk berusia antara 7 tahun hingga 12 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat SD dengan jumlah penduduk berusia 7 tahun hingga 12 tahun. Sedangkan, APM SMP adalah perbandingan penduduk berusia antara 13 tahun hingga 15 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat SMP dengan jumlah penduduk berusia

13 tahun hingga 15 tahun. Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah perbandingan penduduk berusia antara 16 tahun hingga 18 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat SMA dengan jumlah penduduk berusia 16 tahun hingga 18 tahun. Gambar berikut menggambarkan perkembangan nilai APM SD Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dibandingkan dengan nilai APM di Provinsi Kalimantan Selatan.



Gambar 3.1. Perkembangan Nilai APM di Provinsi Kalsel dan Kabupaten Hulu Sungai Utara

Sumber: BPS (2018), diolah

Dari Gambar 3.1 dapat diketahui bahwa tingkat APM mengalami penurunan yang signifikan seiring dengan semakin tingginya tingkat pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa masih cukup banyak masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan maupun Kabupaten Hulu Sungai Utara yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Dari Gambar 3.1 juga dapat diketahui bahwa tingkat APM baik SD, SMP, maupun SMA di Provinsi Kalimantan Selatan tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan nilai APM di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Pada tahun 2016, Nilai APM SD di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebesar 97,69, nilai APM SMP sebesar 72,22, dan nilai APM SMA adalah sebesar 56,82. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa tingkat kesadaran masyarakat dalam mengikuti proses pendidikan di tingkat yang paling dasar adalah masih rendah. Hal

ini terbukti bahwa nilai APM SMP hanya berada di angka 72,22. Oleh karena itu diperlukan upaya yang lebih keras lagi dari Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan.

Nilai APM SD 97,69 menunjukkan bahwa masih ada 2,31% penduduk yang berusia 6-12 tahun tidak mengikuti pendidikan SD di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Hal ini bisa dikarenakan sebagian dari mereka adalah putus sekolah atau tidak pernah mengikuti pendidikan SD. Proporsi ini sebenarnya masih cukup tinggi apalagi pemerintah telah menetapkan program wajib belajar sampai dengan lulus SMP. Nilai APM SMP sebesar 72,22 menunjukkan bahwa masih ada 27,78% penduduk yang berusia 13-18 tahun tidak mengikuti pendidikan SMP di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Selanjutnya, nilai APM SMA sebesar 56,82 menunjukkan bahwa masih ada 43,15% penduduk yang berusia 19-21 tahun yang tidak mengikuti pendidikan SMA di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Hal ini mengindikasikan bahwa masih ada sebagian masyarakat yang masih belum memiliki kesadaran tentang pendidikan atau mereka masih belum memiliki akses terhadap pendidikan. Hal ini akan diidentifikasi lebih lanjut dalam kajian ini terkait tingkat kesadaran masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara terhadap tingkat pendidikan.

Tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan masih rendah dan dimungkinkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya menyadari dan meyakini bahwa untuk mengubah kondisi kehidupan mereka menjadi lebih baik salah satunya adalah melalui pendidikan. Rendahnya angka partisipasi sekolah murni dapat disebabkan oleh daya tampung sekolah yang terbatas, dan akses transportasi menuju sekolah yang juga tidak memadai terutama yang berada pada wilayah-wilayah terpencil dan pinggir seperti pada kecamatan Paminggir. Selain itu minat masyarakat untuk belajar dan mengikuti pendidikan masih lebih rendah dibandingkan bekerja tanpa pendidikan yang tinggi. Masih terdapat sebagian masyarakat yang lebih memilih bekerja tanpa pendidikan dan keahlian daripada mengikuti pendidikan.

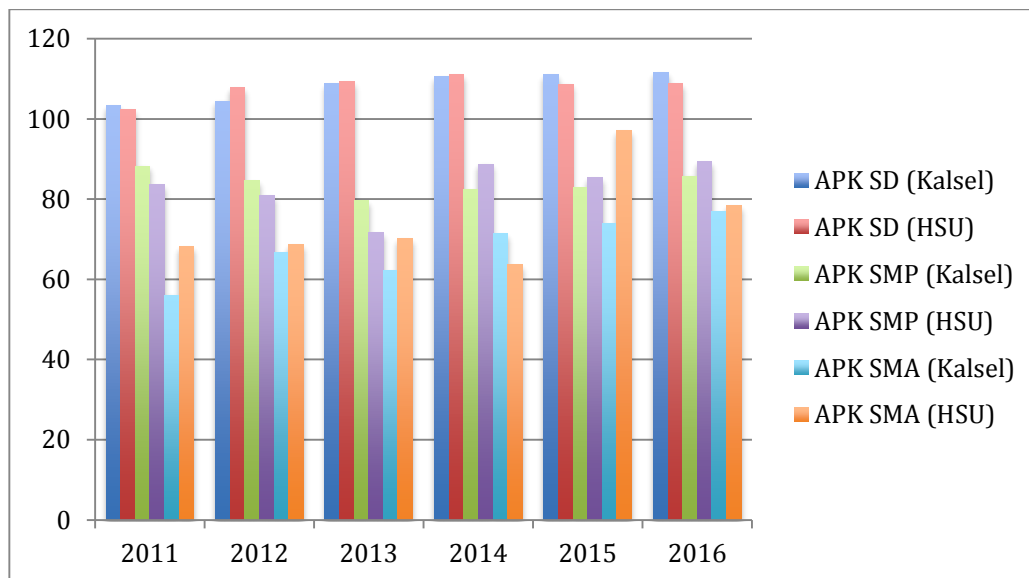
Indikator terkait tingkat pendidikan selanjutnya adalah Angka Partisipasi Kasar (APK). Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. Angka Partisipasi Kasar (APK) lebih dari 100 menunjukkan bahwa masih banyak siswa pada suatu tingkat pendidikan yang sekolah usianya kurang/melebihi kelompok umur usia sekolah pada tingkat tersebut. Jadi, pencapaian APK diharapkan dapat linier dengan pencapaian APM yang artinya kesadaran menempuh pendidikan sesuai dengan kelompok umur tercapai.

Nilai APK yang kurang baik yaitu melebihi 100 persen dapat diduga karena akses menuju ke sekolah jelek, kesadaran masyarakat tentang pendidikan masih sangat rendah, peran pemerintah daerah yang masih kurang serta pemahaman tentang pentingnya pendidikan terhadap masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara masih kurang.

Di dalam GBHN 1993 dicantumkan bahwa pemerintah harus berupaya untuk memperluas kesempatan pendidikan baik pendidikan dasar, pendidikan menengah kejuruan, maupun pendidikan profesional, melalui jalur sekolah dan jalur luar sekolah. Dalam upaya memperluas kesempatan belajar pendidikan dasar, maka pemerintah mencanangkan program pendidikan wajib belajar dari 6 tahun menjadi wajib belajar 9 tahun. Oleh karena itu analisis akan dilakukan secara mendalam terhadap nilai APM terutama nilai APM jenjang pendidikan SD dan SMP. Hal ini dikarenakan nilai APM mengindikasikan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan. Nilai ini memberikan informasi tentang kesesuaian antara tingkat pendidikan yang ditempuh oleh penduduk dan umur pada tingkat pendidikan yang bersangkutan. Sedangkan, Nilai APK Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk tingkat SD pada tahun 2016 adalah 108,72. Nilai APK SMP adalah sebesar 89,28. Selanjutnya, nilai APK SMA adalah 78,45.

Dari seluruh nilai APM dan APK dari jenjang pendidikan SD sampai dengan SMA menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pendidikan masih sangat rendah. Bahkan, program wajib belajar 9 tahun masih belum terimplementasikan dengan baik. Dengan demikian, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara perlu berupaya lebih keras lagi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. Diperlukan sosialisasi, penyuluhan dan pelatihan yang lebih intens kepada masyarakat untuk mengubah paradigma masyarakat terhadap pendidikan. Pendidikan sangatlah penting, karena pendidikan dapat memutus tali kemiskinan yang diwariskan oleh generasi sebelumnya. Seharusnya masyarakat telah memiliki kesadaran tentang pentingnya pendidikan apalagi pemerintah telah menetapkan program wajib belajar 9 tahun sejak 19 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 2 Mei 1994. Maka, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara perlu melakukan refleksi terhadap kebijakan yang telah dilakukan terutama di bidang pendidikan. Selain itu diperlukan formulasi kebijakan yang tepat untuk meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam pendidikan dan upaya pencapaian program wajib belajar 9 tahun khususnya.

Sehubungan dengan daya saing Kabupaten Hulu Sungai Utara maka berikut merupakan perbandingan nilai APK dan APM Kabupaten Hulu Sungai Utara dibandingkan dengan nilai APK dan APM Provinsi Kalimantan Selatan. Nilai APK Provinsi Kalimantan Selatan untuk tingkat SD pada tahun 2016 adalah 108,72. Nilai APK SMP Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebesar 89,28. Selanjutnya, nilai APK SMA Provinsi Kalimantan Selatan adalah 78,45. Berikut merupakan perkembangan nilai APK di Kabupaten Hulu Sungai Utara dibandingkan dengan nilai APK Provinsi Kalimantan Selatan selama lima tahun terakhir baik APK di tingkat SD, SMP, maupun SMA.



Gambar 3.2. Perkembangan Nilai APK di Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Hulu Sungai Utara

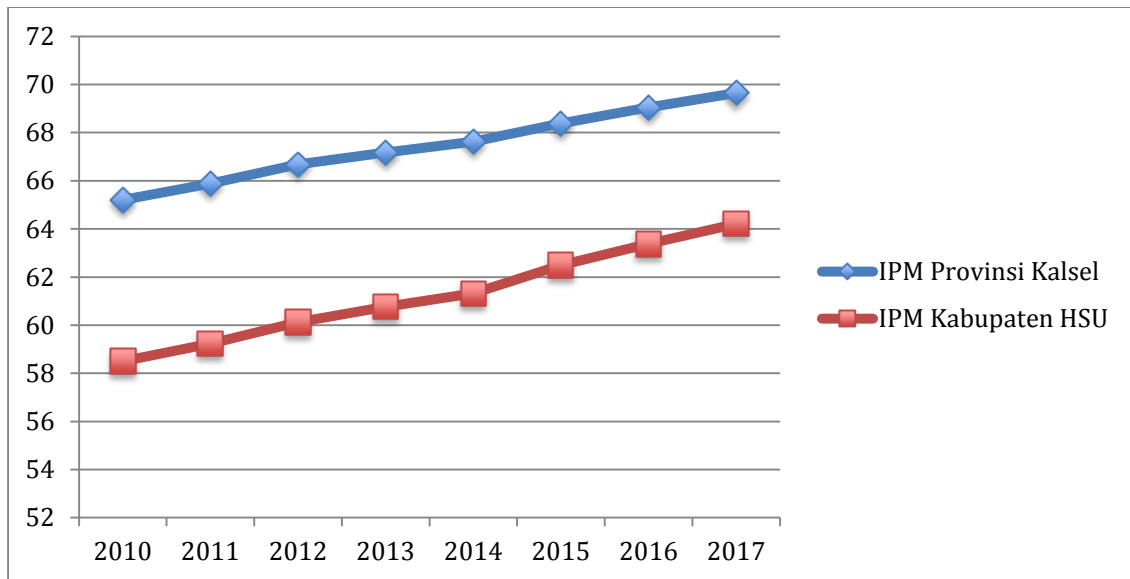
Sumber: BPS (2018), diolah

Dari Gambar 3.1 dapat diketahui bahwa tingkat APK mengalami penurunan yang signifikan seiring dengan semakin tingginya tingkat pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa masih cukup banyak masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan maupun Kabupaten Hulu Sungai Utara yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Dari Gambar 3.1 juga dapat diketahui bahwa tingkat APK baik SD, SMP, maupun SMA di Provinsi Kalimantan Selatan tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan nilai APK di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Gambar 3.2 menunjukkan bahwa secara rata-rata nilai APK dan APM Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Nilai APM SD Provinsi Kalimantan Selatan secara rata-rata lebih tinggi dibandingkan nilai APM SD Kabupaten Hulu Sungai Utara. Nilai APM SMP Provinsi Kalimantan Selatan secara rata-rata juga lebih tinggi dibandingkan nilai APM SMP Kabupaten Hulu Sungai Utara. Namun, nilai APM SMA Provinsi Kalimantan Selatan secara rata-rata lebih rendah dibandingkan nilai APM SMA Kabupaten Hulu Sungai Utara. Nilai APK SD Provinsi Kalimantan Selatan secara rata-rata lebih tinggi dibandingkan nilai APK SD Kabupaten Hulu Sungai Utara. Namun, Nilai APK SMP dan SMA Provinsi Kalimantan Selatan secara rata-rata lebih rendah dibandingkan nilai APK SMP dan SMA Kabupaten Hulu Sungai Utara. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki daya saing yang cukup baik dari bidang pendidikan khususnya. Pendidikan yang baik diharapkan dapat menghasilkan tenaga kerja yang baik dan terampil sehingga dapat mendorong perekonomian.

Apabila dilihat dari nilai IPM, nilai IPM Kabupaten Hulu Sungai Utara selama 8 (delapan) tahun terakhir terus-menerus mengalami peningkatan. Meskipun demikian, nilai IPM Kabupaten Hulu Sungai Utara terkategori cukup rendah. Nilai IPM Kabupaten Hulu Sungai Utara selama tujuh tahun terakhir ditampilkan dalam gambar sebagai berikut. Pada tahun 2010 nilai IPM Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah 58,50. Nilai IPM tahun 2011 adalah 59,24. Nilai IPM terus mengalami peningkatan pada tahun-tahun selanjutnya hingga pada tahun 2016 nilai IPM Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah 63,38. Selanjutnya pada tahun 2017 nilai IPM Kabupaten Hulu Sungai Utara mencapai 64,21.

Apabila dibandingkan dengan nilai IPM Provinsi Kalimantan Selatan, dapat diketahui bahwa selama 8 (delapan) tahun terakhir nilai IPM Provinsi Kalimantan Selatan juga mengalami peningkatan. Nilai IPM Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2010 adalah 65,20. Nilai IPM tahun 2011 adalah 65,89. Nilai IPM Provinsi Kalimantan Selatan juga terus mengalami peningkatan pada tahun-tahun selanjutnya hingga pada tahun 2016 nilai IPM Provinsi Kalimantan Selatan adalah 69,05 dan pada tahun 2017 nilai IPM Provinsi Kalimantan Selatan mencapai 69,65.



Gambar 3.3. Perbandingan Nilai IPM Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Nilai IPM Provinsi Kalimantan Selatan (2010-2017)

Sumber: BPS, 2018

Dari Gambar 3.3 dapat disimpulkan bahwa nilai IPM Kabupaten Hulu Sungai Utara masih lebih rendah dibandingkan nilai IPM Provinsi Kalimantan Selatan. Nilai IPM di kedua wilayah tersebut terus mengalami peningkatan selama 8 (delapan) tahun terakhir. Jika dilihat dari tren 3 (tiga) tahun terakhir dapat diketahui bahwa nilai deviasi antara nilai IPM Kabupaten Hulu Sungai Utara dibandingkan dengan nilai IPM Provinsi Kalimantan Selatan memiliki nilai deviasi yang semakin rendah.

Pencapaian di bidang pendidikan didukung oleh kinerja pembangunan fisik yang berupa sarana dan prasarana pendidikan seperti bangunan sekolah. Di samping sekolah negeri, sekolah swasta juga ikut andil dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia terutama para generasi muda. Pada tahun 2016 jumlah SD negeri di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebanyak 177 unit, sedangkan jumlah SD swasta adalah sebanyak 8 unit sehingga jumlah SD di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebanyak 185 unit. Jumlah sekolah SMP Negeri di Kabupaten Hulu sungai Utara adalah sebanyak 27 unit. Sedangkan, jumlah sekolah SMP swasta adalah sebanyak 3 unit. Dengan demikian, jumlah sekolah SMP di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebanyak 30 unit. Jumlah sekolah SMA Negeri pada tahun 2016 adalah sebanyak 6 unit dan jumlah SMA swasta adalah sebanyak 2 unit, sehingga jumlah sekolah SMA di tahun 2016 berjumlah 8 unit. Sedangkan, jumlah sekolah SMK

Negeri adalah sebanyak 4 unit. Jumlah sekolah SMK swasta berjumlah 3 unit, sehingga jumlah sekolah SMK di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah berjumlah 7 unit pada tahun 2017.

Rasio murid dan guru juga berperan dalam keberhasilan di bidang pendidikan. Data HSU DA menunjukkan bahwa rasio murid dan guru pada tahun 2016 telah mengarah pada nilai ideal, yang mana pada tingkat SD rasionya mencapai 7:1, SMP mencapai 9:1, SMA mencapai 13:1. Untuk rasio murid dan guru sekolah negeri di bawah Kementerian Agama di tahun 2016 untuk MI mencapai 9:1, MTs mencapai 13:1, dan MA mencapai 11:1. Jika dibandingkan, rasio murid dan guru MTs lebih tinggi daripada SMP Negeri. Demikian halnya dengan rasio murid dan guru MI juga lebih tinggi dibandingkan dengan SD. Sebaliknya, rasio murid dan guru di MA justru lebih rendah dibandingkan di SMA. Nilai-nilai rasio tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap guru sudah tercukupi dengan baik. Oleh karena itu, rekomendasi utama dari penjelasan di atas adalah ketersediaan sarana fisik sekolah dan ketersediaan tenaga didik (guru) sudah mencukupi. Meskipun demikian, Dinas Pendidikan tetap perlu untuk mengupayakan implementasi program pendidikan dengan terobosan yang nyata, konkrit dan baik agar kualitas pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Utara menjadi lebih baik.

Faktor lainnya yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan adalah kemauan atau motivasi penduduk untuk membaca. Dengan membaca maka akan banyak ilmu/pengetahuan yang akan diperoleh. Pemahaman penduduk terhadap pentingnya pendidikan dapat meningkat melalui kebiasaan membaca buku, majalah, surat kabar, dsb. Kemauan atau motivasi untuk membaca dapat direfleksikan oleh data pengunjung perpustakaan daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Perpustakaan merupakan salah satu wadah yang menyajikan banyak informasi bagi masyarakat melalui kegiatan membaca, pelatihan dsb. Data pengunjung perpustakaan daerah akan dibandingkan tiap tahunnya dan dibandingkan untuk setiap status pekerjaan.

Dari data HSU DA diketahui bahwa pada tahun 2016 murid SD yang mengunjungi perpustakaan adalah sebanyak 1.364 orang. Murid SMP yang mengunjungi perpustakaan pada tahun 2016 adalah sebanyak 2150 orang. Apabila dibandingkan dengan murid SMA, pada tahun 2016 jumlah murid SMA yang mengunjungi perpustakaan adalah sebanyak 4618 orang. Selain siswa SD, SMP, dan SMA, perpustakaan daerah juga dikunjungi oleh mahasiswa, guru/dosen, TNI/POLRI, dan masyarakat umum. Jumlah mahasiswa yang mengunjungi perpustakaan pada

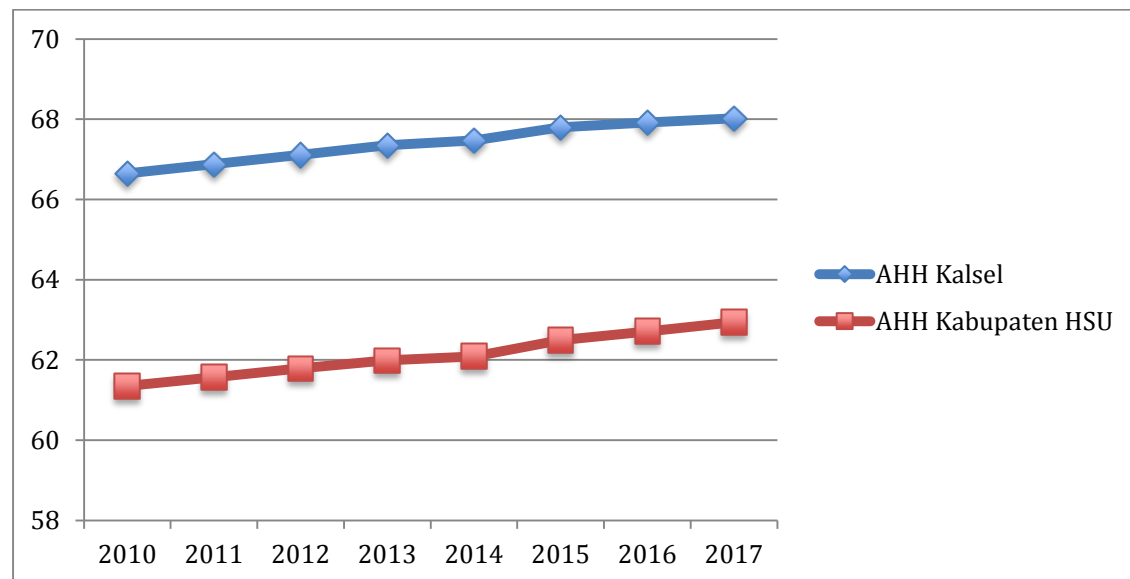
tahun 2016 adalah sebanyak 16.265 orang. Jumlah guru/dosen yang mengunjungi perpustakaan pada tahun 2016 adalah sebanyak 2652 orang. Selanjutnya, jumlah TNI/POLRI yang mengunjungi perpustakaan pada tahun 2016 adalah sebanyak 21 orang. Sedangkan, pengunjung perpustakaan dari masyarakat umum adalah berjumlah 1994 orang. Semakin banyak dan beragam kelompok masyarakat yang mengunjungi perpustakaan maka semakin baik bagi perkembangan kualitas bidang pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dengan banyaknya kelompok masyarakat yang mengunjungi perpustakaan maka diharapkan segala informasi dan ilmu pengetahuan dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Pengunjung perpustakaan yang paling banyak di tahun 2016 adalah mahasiswa. Hal ini merupakan salah satu indikator yang baik karena budaya membaca di mahasiswa adalah cukup baik.

Jumlah pengunjung perpustakaan yang paling rendah adalah PNS, TNI/POLRI. Hal ini dapat dikarenakan bahwa kurangnya motivasi untuk membaca dari kelompok tersebut atau terdapat kemungkinan bahwa fasilitas di perpustakaan menjadi kurang menarik lagi bagi kelompok tersebut. Dengan demikian diperlukan upaya khusus bagi pihak perpustakaan daerah dalam memotivasi keinginan masyarakat untuk membaca dan berupaya mendapatkan ilmu pengetahuan terutama bagi siswa, mahasiswa maupun PNS. Dapat dilihat dari data bahwa minat kelompok PNS, TNI/POLRI dalam membaca, mengunjungi perpustakaan masih kurang baik dibandingkan kelompok siswa dan mahasiswa.

Pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara perlu melakukan penelitian dan mencari tahu mengapa fenomena tersebut di atas dapat terjadi, apakah terjadi penurunan motivasi membaca dan mencari ilmu pengetahuan baru oleh penduduk, atau terdapat kemungkinan bahwa fasilitas perpustakaan sudah tidak menarik lagi dan sudah tidak *update*. Dengan adanya inovasi pada perpustakaan, misal penambahan fasilitas komputer, internet, buku-buku baru dan *update*, dan fasilitas lainnya diharapkan dapat meningkatkan jumlah pengunjung dan anggota perpustakaan daerah. Dengan banyaknya jumlah pengunjung dan anggota perpustakaan daerah diharapkan motivasi masyarakat untuk membaca dan mencari ilmu pengetahuan baru makin tinggi sehingga kualitas hidup masyarakat dapat lebih baik dengan banyaknya informasi yang diterima.

3.2. Bidang Kesehatan

Salah satu indikator kesehatan yang biasa digunakan untuk mengidentifikasi perkembangan pembangunan di bidang kesehatan adalah Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir. Berikut merupakan perbandingan perkembangan AHH di Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Provinsi Kalimantan Selatan selama 8 (delapan) tahun terakhir.



Gambar 3.4. Perbandingan Nilai Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Nilai AHH Provinsi Kalimantan Selatan (2010-2017)

Sumber: BPS, 2018

Gambar 3.4 menunjukkan bahwa nilai AHH Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Provinsi Kalimantan Selatan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada gambar tersebut diketahui bahwa nilai AHH Kabupaten Hulu Sungai Utara masih lebih rendah dibandingkan dengan nilai AHH Provinsi Kalimantan Selatan. Nilai AHH Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2010 adalah 66,65 tahun dan terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2017 nilai AHH Provinsi Kalimantan Selatan adalah 68,02 tahun. Artinya, setiap bayi yang baru lahir di Provinsi Kalimantan Selatan secara rata-rata memiliki tingkat harapan hidup sampai dengan 68,02 tahun.

Nilai AHH Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2010 adalah 61,35 tahun dan terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2017 nilai AHH Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah 62,94 tahun. Artinya, setiap bayi yang baru lahir di Kabupaten

Hulu Sungai Utara secara rata-rata memiliki tingkat harapan hidup sampai dengan 62,94 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesehatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara apabila dilihat dari nilai AHH masih lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata tingkat kesehatan di Provinsi Kalimantan Selatan.

Pembangunan di bidang kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Oleh karena itu, masyarakat berhak memperoleh pelayanan dasar kesehatan yang memadai dari Pemerintah sesuai standar pelayanan minimal (SPM) yang telah ditetapkan, sehingga semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara merata dan terjangkau. Agar tujuan tersebut dapat terwujud, salah satunya adalah ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan mutlak dibutuhkan. Disisi lain, pelayanan kesehatan yang berkualitas juga tetap harus diperhatikan agar mutu kesehatan masyarakat meningkat.

Pada tahun 2016 seluruh sarana kesehatan yaitu berupa puskesmas lokal, puskesmas pembantu, polindes dan poskesdes berjumlah 104 unit. Menurut data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2016, fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah 2 rumah sakit, 13 puskesmas, 30 puskesmas pembantu, 312 posyandu, dan 3 polindes. Fasilitas kesehatan puskesmas sudah ada di semua kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Selain kuantitas yang perlu ditingkatkan untuk sarana kesehatan, perlu juga untuk meningkatkan kualitas sarana kesehatan.

Dari data diketahui bahwa fasilitas tenaga medis seperti dokter, bidan, perawat, dan lainnya terus menerus dilakukan perbaikan dan peningkatan. Sehingga, pada tahun 2016 tenaga medis berupa dokter mengalami berjumlah 35 orang. Jumlah tenaga keperawatan adalah sebanyak 251 orang. Jumlah tenaga kebidanan adalah sebanyak 177 orang. Sedangkan jumlah dukun bayi di tahun 2016 adalah sebanyak 102 orang. Dari data menunjukkan bahwa distribusi perawat bidan di Kabupaten Hulu sungai Utara telah terdistribusi dengan baik untuk setiap kecamatan disesuaikan dengan jumlah penduduk. Hal ini mengindikasikan sebuah perkembangan yang baik dari sisi kesehatan, karena tenaga medis mengalami peningkatan secara terus-menerus dari tahun ke tahun (HSU DA, 2010-2017).

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah distribusi tenaga kesehatan tersebut pada tiap kecamatan dalam melayani kesehatan masyarakat. Pada tahun 2016 sudah tidak terdapat lagi kecamatan yang tidak memiliki dokter umum praktek. Meskipun, jumlah tenaga medis banyak terkonsentrasi di Kecamatan Amuntai Tengah, ibukota Kabupaten Hulu Sungai Utara. Jumlah tenaga medis (dokter) di Kecamatan Danau Panggang berjumlah 2 orang, Paminggir (1 orang), Babirik (2 orang), Sungai Pandan (3 orang), Sungai Tabukan (2 orang), Amuntai Selatan (1 orang), Amuntai Tengah (19 orang), Banjang (1 orang), Amuntai Utara (3 orang), dan Kecamatan Haur Gading (1 orang). Sedangkan, jumlah tenaga keperawatan di Kecamatan Danau Panggang adalah 14 orang, Paminggir (19 orang), Babirik (9 orang), Sungai Pandan (20 orang), Sungai Tabukan (9 orang), Amuntai Selatan (16 orang), Amuntai Tengah (117 orang), Banjang (14 orang), Amuntai Utara (22 orang), dan Kecamatan Haur Gading (11 orang). Jumlah tenaga kebidanan di Kecamatan Danau Panggang berjumlah 9 orang, Paminggir (6 orang), Babirik (15 orang), Sungai Pandan (23 orang), Sungai Tabukan (9 orang), Amuntai Selatan (19 orang), Amuntai Tengah (55 orang), Banjang (15 orang), Amuntai Utara (16 orang), dan Kecamatan Haur Gading (10 orang). Jumlah dukun bayi/dukun kampung di Kecamatan Danau Panggang berjumlah 24 orang, Paminggir (7 orang), Babirik (8 orang), Sungai Pandan (14 orang), Sungai Tabukan (9 orang), Amuntai Selatan (7 orang), Amuntai Tengah (7 orang), Banjang (14 orang), Amuntai Utara (12 orang), dan Kecamatan Haur Gading tidak memiliki dukun bayi/dukun kampung.

Jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat disimpulkan masih kurang terutama tenaga dokter yang mana jumlah dokter hanya sebanyak 35 dokter pada tahun 2016. Maka, diharapkan untuk tahun-tahun berikutnya dapat mengalami peningkatan yang terus-menerus baik kuantitas maupun kualitas sehingga dapat melayani kebutuhan kesehatan masyarakat dengan lebih baik.

Perkembangan pada aspek sarana kesehatan dianggap berbanding lurus dengan perbaikan mutu kesehatan masyarakat. Tentu perlu dilihat perkembangan derajat kesehatan yang dikembangkan oleh beberapa indikator kesehatan. Derajat kesehatan merupakan pencerminan kesehatan perorangan, kelompok maupun masyarakat yang digambarkan dengan Umur Harapan Hidup (UHH), Mortalitas (angka kematian), Morbiditas (angka kesakitan), dan status gizi masyarakat.

Menurut evaluasi pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara, dalam 5 tahun terakhir menggambarkan permasalahan kesehatan ibu dan anak

menjadi masalah besar dan *urgent*. Kematian ibu dan bayi semakin meningkat dari tahun ke tahun. Persalinan yang ditangani tenaga kesehatan mencapai target namun kematian ibu dan bayi masih tinggi yang mencerminkan masih rendahnya kualitas pelayanan kesehatan. Untuk itu, diperlukan upaya kesehatan yang bersifat reformatif dan akseleratif yang ditujukan untuk peningkatan akses, kualitas pelayanan kesehatan dan kesehatan lingkungan terutama dalam menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan bayi (AKB), perbaikan gizi masyarakat, peningkatan umur harapan hidup, pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta pemberdayaan masyarakat.

Angka kematian bayi adalah jumlah kematian bayi (sebelum berumur 1 tahun) dalam periode tertentu per 1000 bayi yang lahir hidup pada tahun bersangkutan. Angka kematian bayi merupakan indikator yang paling peka dalam menggambarkan ketersediaan, penggunaan, dan efektifitas pelayanan kesehatan. Angka kelangsungan hidup bayi (AKBH) adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun. Data HSU DA 2017 menunjukkan bahwa jumlah bayi lahir hidup di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebanyak 3849 bayi yang mana jumlah bayi lahir hidup di Kecamatan Danau Panggang adalah sebanyak 355 bayi, Paminggir (133), Babirik (353), Sungai Pandan (469 orang), Sungai Tabukan (274 orang), Amuntai Selatan (490 orang), Amuntai Tengah (886 orang), Banjang (280 orang), Amuntai Utara (359 orang), dan Kecamatan Haur Gading (250). Jumlah bayi lahir mati sangat sedikit yaitu sebanyak 11 bayi yaitu terdapat 2 bayi lahir mati di Kecamatan Danau Panggang, 4 bayi lahir mati di Kecamatan Paminggir, 3 bayi lahir mati di Kecamatan Amuntai Selatan, dan 2 bayi lahir mati di Kecamatan Amuntai Tengah. Angka ini menunjukkan indikasi yang sangat baik dengan jumlah bayi lahir mati yang sedikit dapat mengindikasikan bahwa sektor kesehatan sudah cukup baik, khususnya tingkat kesehatan ibu dan anak.

Dari laporan RPJMD Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Hulu Sungai Utara lebih banyak terjadi pada masa perinatal (0-7 hari), hal ini bisa disebabkan oleh kesehatan dan gizi ibu selama kehamilan dan cara persalinan serta gangguan yang diterima neonatus setelah beradaptasi dengan dunia luar, termasuk perawatan dan kebiasaan pemberian makanan padat dini pada bayi baru lahir. Tingginya AKB tersebut menunjukkan kualitas dan kemampuan bidan dalam memberikan penanganan terhadap komplikasi neonatus masih rendah. Untuk itu perlu meningkatkan pelayanan dan sosialisasi terhadap ibu hamil untuk lebih menjaga kesehatan dan gizi janin bayi, meningkatkan program imunisasi, pencegahan penyakit

menular pada anak-anak, dan program sosialisasi hidup sehat dan makan dengan makanan bergizi terhadap orang tua dan anak sekolah. Dalam pemberian imunisasi diperlukan adanya peningkatan kegiatan sosialisasi pada masyarakat tentang pentingnya imunisasi. Selain itu pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara hendaknya melakukan *monitoring* yang lebih intensif dalam pelaksanaan imunisasi. Bagaimanapun, kegiatan imunisasi dapat meningkatkan kesehatan masyarakat khususnya balita. Dengan generasi yang sehat maka diharapkan dapat melanjutkan pembangunan dengan lebih baik.

Dalam menggunakan fasilitas kesehatan yaitu rawat jalan dan rawat inap, masyarakat dapat menggunakan pembayaran umum dan fasilitas pembayaran asuransi. Jenis asuransi yang termasuk dalam program pemerintah di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah Asuransi Kesehatan (Askes) dan Asuransi Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Berdasarkan data HSU Dalam Angka 2017 diketahui bahwa pada tahun 2016 jumlah pembayaran fasilitas kesehatan dengan Askes/Jamkesmas/BPJS mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015.

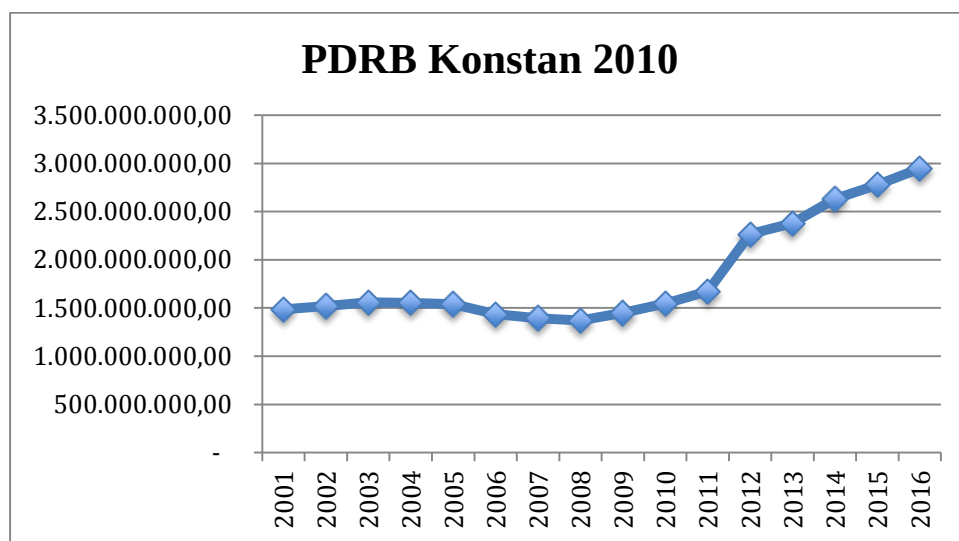
3.3. Bidang Ekonomi

Untuk menganalisis perkembangan pembangunan bidang sosial ekonomi, salah satu pendekatan yang dilakukan adalah dengan menganalisis indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan sebagai indikator utama yang menjadi komponen pembentuk IPM. Sementara indikator pendukung hanya menjelaskan beberapa indikator saja seperti PDRB per kapita, *Gini Ratio*, dan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

3.3.1. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Data yang dikeluarkan oleh BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara terkait data PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara diperoleh dari Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Angka. Nilai PDRB yang ditampilkan dalam sajian data tersebut atas dasar harga berlaku dari tahun 2001-2015. Maka dari itu penelitian ini melakukan transformasi ke nilai PDRB riil menggunakan tahun dasar 2010 dari nilai deflator yang disediakan oleh *World Bank*. Nilai PDRB (harga konstan) Kabupaten Hulu Sungai Utara ditampilkan dalam Gambar 3.5. Data PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara diubah dengan tahun dasar yang sama agar dapat dibandingkan antar waktu.

Gambar 3.5 menunjukkan bahwa nilai PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara mengalami kenaikan yang tidak signifikan dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2000. Selanjutnya, nilai PDRB mengalami penurunan dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2008. Pada tahun berikutnya yaitu dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 nilai PDRB mengalami kenaikan yang tidak signifikan. Nilai PDRB mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016, sehingga pada tahun 2016 nilai PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara mencapai 2,95 triliun rupiah.

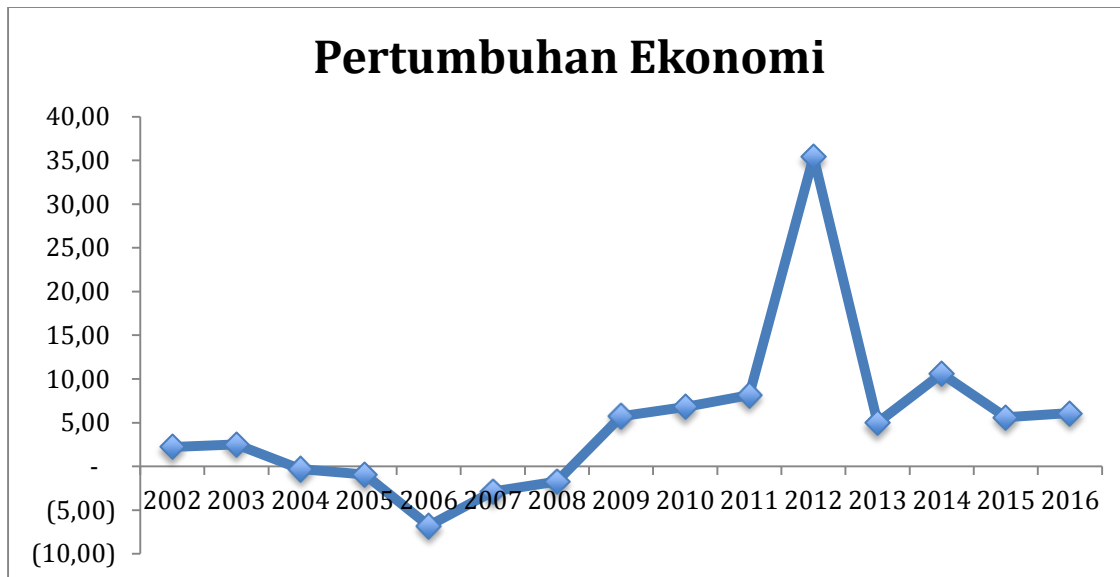


Gambar 3.5. Nilai PDRB Konstan (2010) Kabupaten Hulu Sungai Utara 2001-2016.

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kabupaten HSU Dalam Angka, berbagai edisi (data diolah).

3.3.2. Pertumbuhan Ekonomi

Data pertumbuhan ekonomi yang disediakan oleh BPS berbeda tahun dasarnya antar setiap publikasi. Maka dari itu penelitian ini melakukan transformasi ulang atas data PDRB dan pertumbuhan ekonomi menggunakan tahun dasar yang sama sehingga dapat dibandingkan antar waktu untuk dilakukan analisis. Adapun perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2002 sampai dengan tahun 2016 ditampilkan dalam Gambar 3.6 sebagai berikut.



Gambar 3.6. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi (Konstan=2010) Kabupaten Hulu Sungai Utara 2002-2016.

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kabupaten HSU Dalam Angka, berbagai edisi (data diolah).

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara mengalami perubahan yang cukup fluktuatif dari tahun ke tahun. Meskipun demikian, tren laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara menunjukkan adanya tren kenaikan yang relatif rendah. Pada tahun 2004-2008 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara bernilai negatif. Selanjutnya, pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi bernilai positif dan mengalami kenaikan yang terus menerus hingga pada tahun 2011 nilai pertumbuhan ekonomi mencapai 8,16%. Selanjutnya pada tahun 2012 tingkat pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan yang sangat signifikan hingga mencapai 35,41%. Pada tahun berikutnya tingkat pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan kembali menjadi 4,99% dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2014 yaitu sebesar 10,59%. Untuk selanjutnya pertumbuhan ekonomi menurun dan mengalami kenaikan yang cukup konstan, yang mana tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 adalah sebesar 5,61% dan pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi mencapai 6,10%.

Kesenjangan ekonomi masih terjadi antar daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Salah satunya yaitu tingkat kemiskinan daerah pedesaan relatif lebih tinggi dibandingkan dengan daerah kota. Hal ini dapat terjadi dikarenakan tingkat pengangguran di pedesaan belum mengalami penurunan yang signifikan. Bahkan,

yang terjadi adalah adanya pengalihan tenaga kerja secara alamiah dari sektor pertanian ke sektor manufaktur (pengolahan data Sakernas, 2008-2016). Hal ini dapat dikarenakan tingkat upah di sektor manufaktur lebih tinggi dibandingkan sektor pertanian. Akibatnya sektor pertanian mengalami penurunan produktifitas sehingga masyarakat pedesaan yang pada umumnya bekerja di sektor pertanian berada di bawah garis kemiskinan. Jika hal ini dibiarkan secara terus menerus maka kesenjangan ekonomi antara daerah perkotaan dan pedesaan serta kesenjangan ekonomi antara sektor pertanian dan manufaktur akan terus mengalami peningkatan.

Dari HSU DA 2008-2017, dapat diketahui bahwa sektor pertanian, perkebunan dan perikanan mengalami perlambatan laju pertumbuhan produksi. Padahal, sektor pertanian, perkebunan dan perikanan sebagai sektor usaha yang banyak menyerap tenaga kerja dari penduduk miskin. Perlambatan laju pertumbuhan di sektor tersebut mengakibatkan kesenjangan ekonomi antar sektor mengalami peningkatan. Pada kenyataannya, kesenjangan yang terjadi bukan hanya dari sisi ekonomi namun terjadi pula pada sisi non-ekonomi. Kesenjangan ekonomi ditunjukkan dengan timpangnya pertumbuhan pengeluaran antar kelompok masyarakat. Kesenjangan non-ekonomi ditunjukkan dengan ketimpangan akses terhadap pelayanan dasar, yaitu kesehatan, pendidikan, air dan sanitasi, serta pelayanan dasar lainnya.

Kesenjangan yang terjadi antar sektor yaitu antara pekerja formal dan informal, antara sektor pertanian dan non-pertanian, serta kesenjangan antara daerah pedesaan dan perkotaan. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kesenjangan yaitu: kebijakan yang tidak pro-poor, kurangnya akses terhadap sarana-prasarana pendukung ekonomi untuk masyarakat menengah ke bawah, berkurangnya kebutuhan tenaga kurang terampil, pertumbuhan penduduk kelompok ekonomi menengah ke bawah yang relatif tinggi, tidak adanya peningkatan upah yang signifikan. Dengan demikian diperlukan intervensi berupa kebijakan pemerintah yang *pro-poor*, khususnya untuk kelompok masyarakat menengah ke bawah, yaitu dengan meningkatkan keterampilan, produktivitas, akses terhadap modal sehingga dapat meningkatkan akses terhadap kegiatan ekonomi produktif.

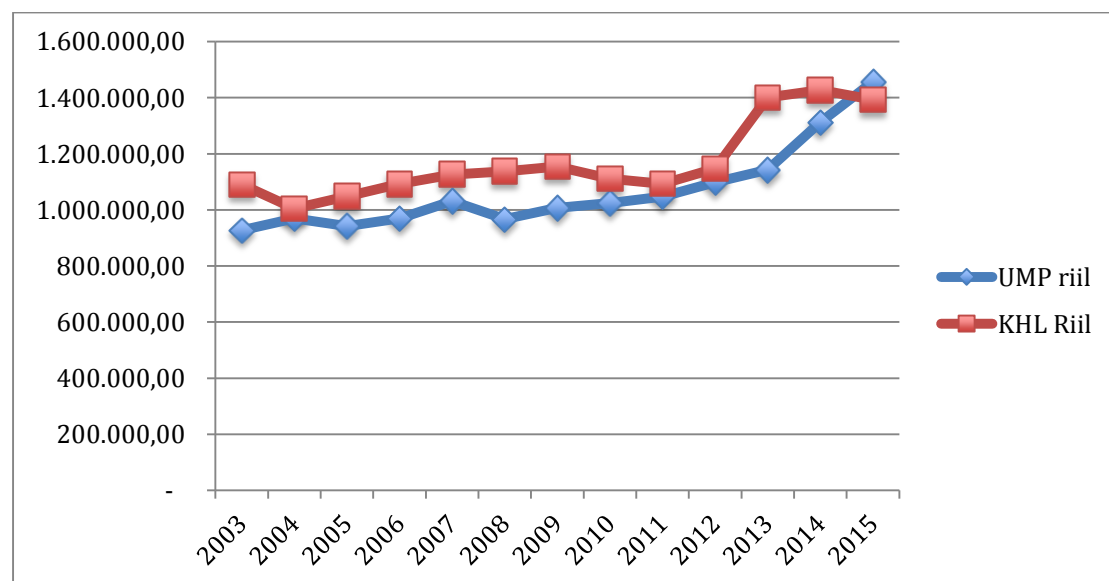
Perbedaan yang mencolok antara tingkat pendapatan pada sektor pertanian dan non-pertanian menyebabkan kesenjangan semakin tinggi. Pekerja dengan keahlian yang lebih tinggi mendapatkan upah relatif jauh lebih besar dibandingkan pekerja biasa. Upah pekerja di sektor formal relatif lebih tinggi dibandingkan upah pekerja di

sektor informal. Pekerja pada sektor formal lebih banyak terdapat pada pusat-pusat ekonomi terutama di daerah perkotaan.

Penurunan yang cukup tajam atas proporsi tenaga kerja di bidang pertanian juga disebabkan oleh kualitas SDM yang masih belum siap dan tingginya keahlian yang diperlukan untuk sektor industri. Sedangkan tingkat pendidikan penduduk miskin atau kelompok 40% ekonomi terbawah yang rendah menyebabkan pekerja miskin menjadi kurang kompetitif untuk mendapatkan lapangan kerja yang layak (*Decent Job*).

3.3.3. Kebutuhan Hidup Layak (KHL)

Nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) merupakan nilai uang minimal yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup layak. Kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan atas sandang, pangan dan papan. Secara logika, nilai KHL akan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Adapun perkembangan nilai KHL masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebagai berikut. Perkembangan nilai KHL tersebut telah distandarisasi dengan menggunakan tahun dasar 2010 sehingga dapat dibandingkan dari tahun ke tahun. Nilai KHL dibandingkan dengan nilai Upah Minimum Propinsi (UMP) dengan menggunakan tahun dasar yang sama yaitu tahun dasar 2010. Gambar ini akan menjelaskan apakah KHL dapat tercapai dengan penetapan nilai UMP.



Gambar 3.7 Perkembangan KHL di Kabupaten HSU
Sumber: HSU Dalam Angka

Gambar 3.7 menunjukkan bahwa nilai KHL riil lebih tinggi dibandingkan dengan nilai UMP riil. Hal ini mengindikasikan bahwa nilai UMP yang diperoleh oleh pekerja di Kabupaten Hulu Sungai Utara khususnya masih belum dapat memenuhi KHL yang ada. Dari Gambar 3.7 dapat diketahui bahwa nilai KHL riil di Kabupaten Hulu Sungai Utara cenderung mengalami penurunan pada tiga tahun terakhir. Dengan nilai Angka Hidup Layak yang cenderung mengalami penurunan diharapkan dapat diiringi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara karena dengan nilai KHL yang rendah dapat meningkatkan pencapaian kesejahteraan yang lebih baik terutama oleh masyarakat miskin. Namun pada tahun terakhir yaitu pada tahun 2015 dari data yang disajikan dapat diketahui bahwa nilai KHL telah dapat ditutupi oleh nilai UMP yang ada. Nilai UMP nominal pada tahun 2015 adalah 2.085.050 rupiah dan nilai UMP riil (tahun dasar 2010) adalah 1.585.286 rupiah. Sedangkan nilai KHL nominal tahun 2015 adalah 1.787.814 rupiah dan nilai KHL riil (tahun dasar 2010) adalah 1.392.559 rupiah. Apabila nilai UMP riil lebih tinggi dari nilai KHL riil nya maka kesejahteraan penduduk dapat dikatakan telah baik. Kondisi ini diharapkan dapat terus menerus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

3.3.4. Tingkat Ketergantungan Penduduk

Rasio ketergantungan penduduk (*Dependency ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif dan dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara/daerah apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang.

Rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara periode tahun 2015-2016 masih belum baik, ini diduga penyebabnya adalah belum berhasilnya

program pengendalian penduduk dengan diindikasikan terjadinya pertumbuhan jumlah penduduk usia <15 tahun masih cukup besar, disamping pertumbuhan penduduk usia >65 tahun. Kondisi seperti ini merupakan suatu ciri dari negara berkembang. Intervensi program-program pro pengendalian penduduk masih sangat diperlukan agar terjadi suatu kondisi dimana rasio ketergantungan menjadi kecil dengan dicirikan sedikitnya penduduk usia < 15 tahun serta penduduk usia produktif yang besar.

Tabel 3.1. Rasio Ketergantungan Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara

Rasio Ketergantungan Penduduk Tahun 2015-2016 Kabupaten Hulu Sungai Utara		
Uraian	2015	2016
Jumlah penduduk usia < 15 Tahun	67.174	66.955
Jumlah penduduk usia > 64 Tahun	6.822	10.423
Jumlah penduduk usia tidak produktif 1+2	73.996	77.378
Jumlah penduduk usia 15-64 Tahun	151.390	151.150
Rasio Ketergantungan (3)/(4)	48,88	51,19

Sumber : HSU DA, diolah

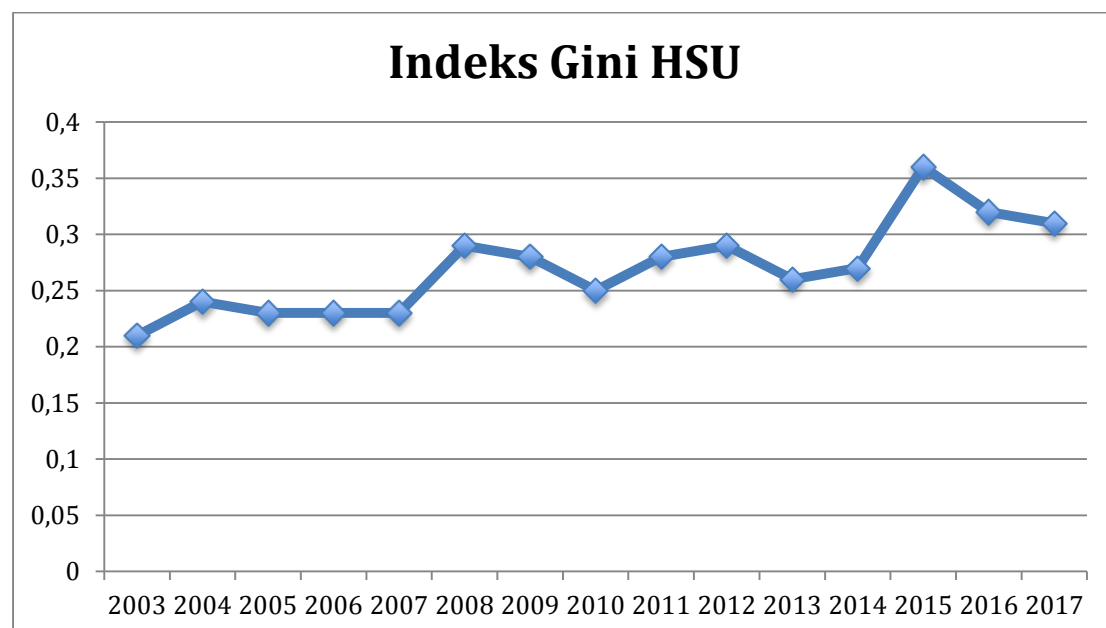
Tabel 3.1 menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara cenderung tinggi. Pada tahun 2015 tingkat ketergantungan penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah 48,88. Artinya setiap 100 penduduk menanggung 49 jiwa. Dengan kata lain setiap 2 penduduk menanggung 1 penduduk. Pada tahun 2016 tingkat ketergantungan penduduk justru mengalami peningkatan menjadi 51,19. Ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan penduduk dan beban perekonomian di Kabupaten Hulu Sungai Utara masih cukup tinggi.

3.3.5. Indeks Gini

Indeks Gini secara luas digunakan untuk mengukur ketimpangan dan distribusi pendapatan. Cara untuk menganalisis distribusi pendapatan perorangan adalah menggunakan kurva Lorenz. Kurva Lorenz menunjukkan hubungan kuantitatif

antara persentase penduduk dan persentase pendapatan yang mereka terima. Kurva ini menggambarkan hubungan antara kelompok-kelompok penduduk dan pangsa (*share*) pendapatan mereka.

Nilai Indeks Gini berkisar antara 0 hingga 1. Semakin mendekati 1 maka dikatakan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk makin melebar, atau mendekati ketimpangan sempurna. Sebaliknya, semakin mendekati 0 distribusi pendapatan penduduk semakin merata, atau mendekati pemerataan sempurna. Nilai Indeks Gini dibagi menjadi tiga tingkatan. Jika nilai Indeks Gini kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan “rendah”; nilainya antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan “moderat”; dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan “tinggi”. Gambar 3.8 berikut ini menggambarkan perkembangan nilai indeks gini Kabupaten Hulu Sungai Utara selama 15 (lima belas) tahun terakhir.



Gambar 3.8 Perkembangan Indeks Gini di Kabupaten Hulu Sungai Utara (2003-2017)

Sumber: BPS (2018), diolah

Gambar 3.8 menunjukkan bahwa nilai indeks gini Kabupaten Hulu Sungai Utara dari tahun ke tahun memiliki kecenderungan untuk mengalami kenaikan. Gambar tersebut juga menunjukkan bahwa terdapat siklus dalam peningkatan nilai indeks gini di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Siklus tersebut terjadi sekitar 4 (empat)

tahunan. Pada tahun 2003 nilai indeks gini di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah 0,21 yang artinya tingkat ketimpangan masyarakat masih rendah. Nilai indeks gini tersebut terus menerus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, sehingga pada tahun 2017 nilai indeks gini mencapai nilai 0,31 yang artinya tingkat ketimpangan masyarakat terkategori moderat. Upaya pemerintah saat ini adalah mengurangi tingkat ketimpangan masyarakat. Salah satu upaya mengurangi ketimpangan masyarakat adalah melalui penurunan tingkat kemiskinan.

BAB IV

KONDISI KEMISKINAN MASYARAKAT DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

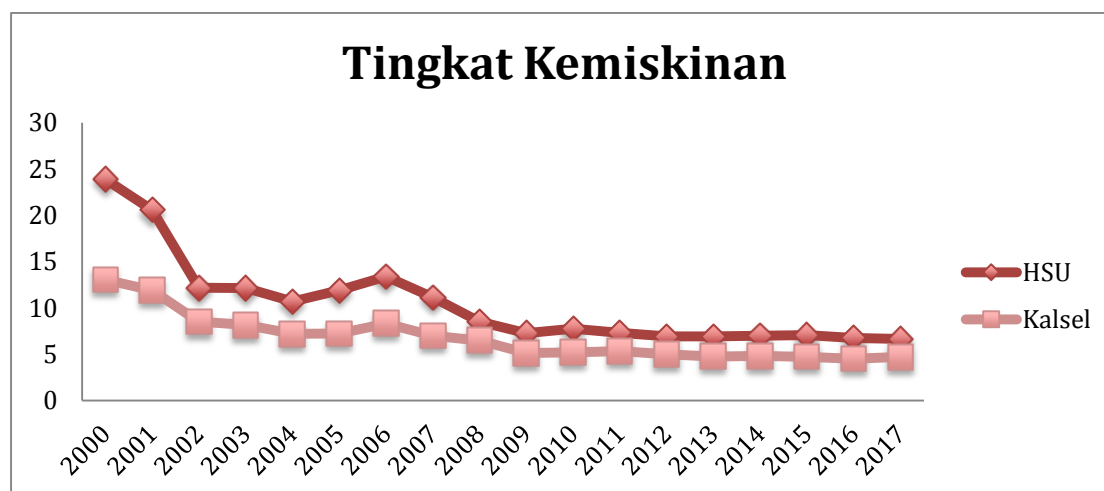
Kemiskinan merupakan permasalahan yang sangat kompleks dan bersifat multi dimensi. Nilai/indeks yang digunakan dalam mengidentifikasi kemiskinan adalah tingkat kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan, dan indeks keparahan kemiskinan. *Pertama* adalah tingkat kemiskinan atau disebut juga persentase kemiskinan, menunjukkan persentase jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan jumlah seluruh penduduk di suatu daerah. *Kedua* adalah Indeks kesenjangan kemiskinan (*poverty gap index*) atau indeks kedalaman kemiskinan (*poverty depth index*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks kesenjangan kemiskinan adalah untuk melihat bagaimana kesenjangan kemiskinan suatu daerah/ wilayah. Maka, semakin tinggi nilai indeks kesenjangan kemiskinan artinya semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. *Ketiga* adalah Indeks Keparahannya Kemiskinan (*poverty severity index*), memberikan informasi tentang penyebaran pendapatan (pengeluaran) di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks ini artinya semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan lembaga pemerintah yang bertugas menyediakan basis data terkait kondisi, dan perkembangan masyarakat dan pemerintahan baik di bidang ekonomi, sosial, kesehatan, dan bidang lainnya di Indonesia. Dalam melakukan kajian ini maka data yang digunakan adalah data yang bersumber dari BPS. Dalam mengukur kondisi kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar dalam mengukur kemiskinan. Kemiskinan dipandang sebagai sebuah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar baik makanan maupun non-makanan yang diukur dari sisi pengeluaran (*expenditure*). Jadi dalam kriteria pengukuran kemiskinan oleh BPS, yang dimaksud penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Pada metodologi yang digunakan oleh BPS, yang dimaksud garis kemiskinan adalah penjumlahan dari garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non-makanan. Garis kemiskinan makanan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yaitu setara dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari. Sedangkan garis kemiskinan non-makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

4.1. Tingkat Kemiskinan

Analisis kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara dimulai dari tahun 2000. Hal ini dikarenakan pada tahun 1998 Indonesia mengalami krisis ekonomi, maka dari analisis kemiskinan dimulai dari tahun 2000 karena diasumsikan telah bebas dari pengaruh krisis tahun 1998. Adapun pergerakan tingkat kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut.



Gambar 4.1 Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara (2000-2017)

Sumber: BPS, diolah

Dari Gambar 4.1 dapat diketahui bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara masih lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan. Pada tahun 2000 persentase kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebesar 23,90 persen dan mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2001 sehingga tingkat kemiskinan menjadi 20,59 persen.

Pada tahun berikutnya yaitu tahun 2002 tingkat kemiskinan menurun kembali dengan signifikan sehingga menjadi 12,18 persen. Selanjutnya, tingkat kemiskinan mengalami penurunan hingga pada tahun 2006 persentase kemiskinan meningkat kembali menjadi 13,38 persen. Setelah tahun 2006 tingkat kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara terus menerus mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga pada tahun 2009 tingkat kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebesar 7,29 persen. Setelah tahun 2009 tingkat kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara cenderung mengalami penurunan meski tidak signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

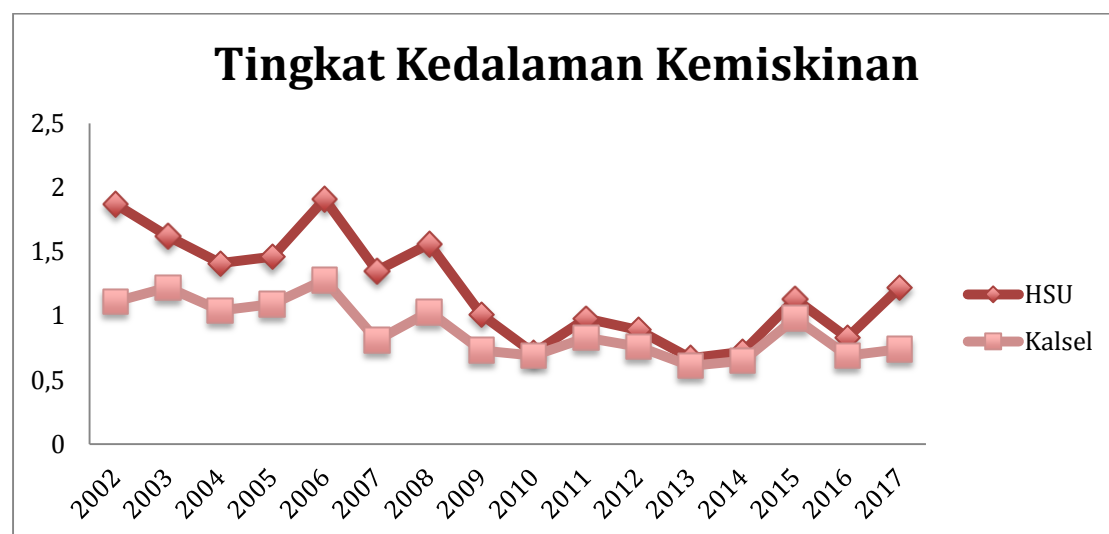
Upaya penanggulangan kemiskinan terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara khususnya sehingga persentase kemiskinan terus mengalami penurunan hingga pada tahun 2016 tingkat kemiskinan mencapai 6,76 persen. Selanjutnya, pada tahun 2017 tingkat kemiskinan mengalami penurunan kembali hingga menjadi 6,65 persen. Dengan tingkat kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara sebesar 6,65 persen maka dapat dikategorikan bahwa tingkat kemiskinan masih cukup tinggi.

4.2. Tingkat Kedalaman Kemiskinan

Indeks kedalaman kemiskinan (*poverty depth index*) dikenal juga sebagai indeks kesenjangan kemiskinan (*poverty gap index*). Indeks kedalaman kemiskinan digunakan untuk mengukur tingkat kedalaman kemiskinan suatu daerah. Indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan dapat digunakan untuk melihat kondisi kesenjangan kemiskinan suatu daerah/wilayah. Semakin tinggi nilai indeks kedalaman kemiskinan artinya semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Maka dari itu, keberhasilan upaya penanggulangan kemiskinan dapat diidentifikasi dari nilai indeks kedalaman kemiskinan yang semakin rendah. Dengan demikian, semakin rendah tingkat kedalaman kemiskinan menunjukkan bahwa kondisi perekonomian suatu daerah semakin baik.

Pada tahun 2002 indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah 1,87. Untuk selanjutnya indeks kedalaman kemiskinan mengalami penurunan hingga tahun 2004 indeks kedalaman kemiskinan mencapai 1,41. Pada

tahun 2005 indeks kedalaman kemiskinan mengalami peningkatan, sehingga pada tahun 2006 indeks kedalaman kemiskinan menjadi sangat tinggi yaitu sebesar 1,91 (lebih tinggi dibandingkan indeks kedalaman kemiskinan tahun-tahun sebelumnya). Pada tahun 2007 indeks kedalaman kemiskinan kembali menurun, namun meningkat kembali di tahun 2008. Pasca tahun 2008 indeks kedalaman kemiskinan cenderung terus mengalami penurunan hingga pada tahun 2016 indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Utara mencapai angka 0,83. Namun pada tahun berikutnya yaitu tahun 2017 indeks kedalaman kemiskinan meningkat kembali menjadi 1,22. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan telah menjadi semakin jauh, artinya taraf hidup penduduk miskin semakin menurun. Indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara dibandingkan dengan tingkat kedalaman kemiskinan di Kalimantan Selatan ditampilkan pada gambar sebagai berikut.



Gambar 4.2 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara (2002-2017)

Sumber: BPS, diolah

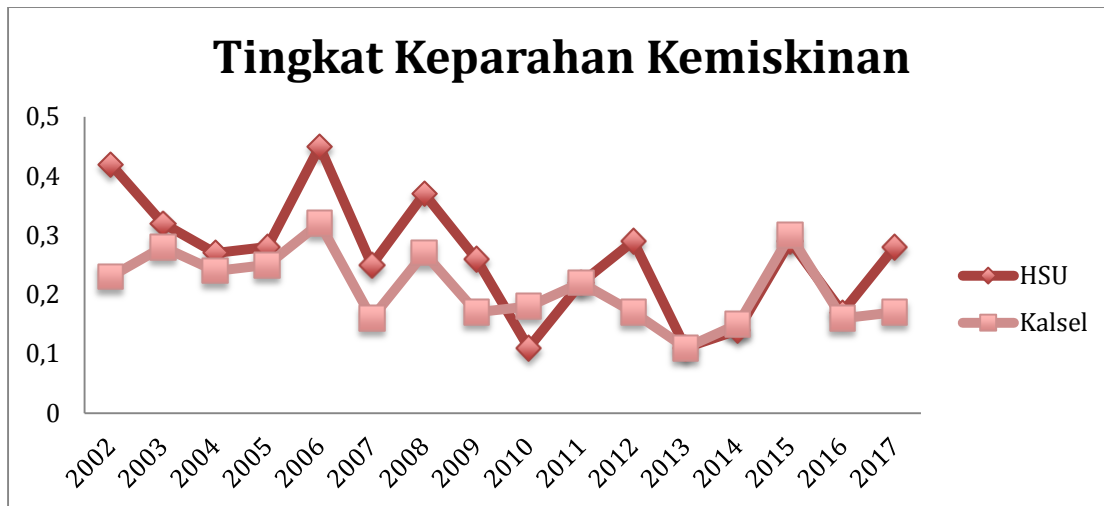
Dari Gambar 5.2 dapat diketahui bahwa tingkat kedalaman kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara masih lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kedalaman kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan. Jumlah penduduk miskin dan presentase penduduk miskin di Kabupaten Hulu Sungai Utara cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun seperti ditampilkan pada Gambar 5.1. Namun tingkat

kedalaman kemiskinan cenderung mengalami perkembangan yang fluktuatif seperti tergambar pada Gambar 5.2. Artinya, rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan mengalami perkembangan yang fluktuatif. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk miskin di Kabupaten Hulu Sungai Utara khususnya masih mengalami kesulitan dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya dan sulit mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik atau keluar dari kemiskinannya. Maka, diperlukan upaya pendampingan yang serius dari pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan karena perkembangan tingkat kedalaman kemiskinan masyarakat cukup fluktuatif. Dengan semakin tingginya tingkat kedalaman kemiskinan menunjukkan bahwa semakin sulit bagi masyarakat miskin untuk keluar dari kondisi kemiskinan.

4.3. Tingkat Keparahan Kemiskinan

Indeks lainnya yang dapat digunakan untuk mengukur kondisi kemiskinan di suatu daerah adalah indeks keparahan kemiskinan (*poverty severity index*). Indeks keparahan kemiskinan mengukur penyebaran pendapatan (pengeluaran) di antara penduduk miskin. Dengan demikian, semakin tinggi nilai indeks keparahan kemiskinan artinya semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks ini memberikan informasi tentang penyebaran pendapatan (pengeluaran) di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks ini artinya semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Perkembangan tingkat keparahan kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara dibandingkan dengan tingkat keparahan kemiskinan di Kalimantan Selatan ditampilkan dalam gambar sebagai berikut.

Dari Gambar 5.3 dapat diketahui bahwa tingkat keparahan kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara masih lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat keparahan kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan. Pada tahun 2002 indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah 0,42. Nilai tersebut menunjukkan bahwa indeks keparahan kemiskinan terkategori cukup tinggi.



Gambar 4.3. Perkembangan Tingkat Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2002-2017

Sumber: BPS, diolah

Dari Gambar 5.3 di atas dapat diketahui bahwa Indeks keparahan kemiskinan kemudian mengalami penurunan pada tahun selanjutnya yaitu setelah tahun 2002 dan meningkat kembali dalam siklus tiga tahunan. Sehingga, pada tahun 2015 nilai indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara mencapai nilai indeks sebesar 0,29. Kemudian pada tahun 2016 indeks keparahan kemiskinan mengalami penurunan kembali menjadi 0,17 menyerupai nilai indeks keparahan kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan yaitu 0,16. Apabila dilihat dari siklusnya, indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki potensi untuk meningkat kembali. Hal ini dapat dilihat bahwa adanya siklus pada gambar plot indeks keparahan kemiskinan pada Gambar 5.3. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2017 faktanya indeks keparahan kemiskinan mengalami peningkatan kembali yaitu menjadi 0,28. Maka, siklus yang terjadi ini hendaknya diantisipasi sejak awal untuk mengurangi pengaruh negatif yang tidak diinginkan.

Dari Gambar 5.3 dapat diketahui bahwa tingkat keparahan kemiskinan bersifat fluktuatif dari tahun ke tahun. Seperti diketahui pada gambar tersebut bahwa fluktuasi tingkat keparahan kemiskinan terjadi setiap tiga tahun sekali. Dari hasil wawancara dengan pihak Bappeda Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat diketahui bahwa adanya siklus pada plot indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan dimungkinkan bahwa hal ini dikarenakan adanya banjir besar dengan siklus yang sama yaitu dua tahunan. Banjir besar yang terjadi ini seringkali memberikan *shock* pada rumah tangga miskin. Tingkat keparahan kemiskinan yang biasanya terjadi

diakibatkan oleh adanya *shock* alam seperti banjir biasanya melanda masyarakat petani. Hal ini dikarenakan banjir dapat mengganggu kondisi pertanian dan hasil panen masyarakat petani.

4.4. Survey terkait Kemiskinan Kultural di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Kajian terkait survey kemiskinan kultural di Kabupaten Hulu Sungai Utara telah dilakukan untuk mengidentifikasi eksistensi dan karakteristik kultur kemiskinan yang ada. Kajian sebelumnya telah melakukan survey terkait eksistensi kultur kemiskinan kepada 100 responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 70 orang dan responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 30 orang dengan berbasis pada data kemiskinan yang telah disusun oleh Bappeda Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kajian ini akan memetakan kultur kemiskinan yang ada serta kebijakan yang dapat dibuat untuk menanggulangi kemiskinan kultural yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Responden survey kultur kemiskinan yang telah dilakukan di Kabupaten Hulu Sungai Utara berasal dari kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Responden yang berasal dari Kecamatan Sungai Pandan berjumlah 7 orang, responden yang berasal dari Kecamatan Sungai Tabukan adalah 10 orang, responden yang berasal dari Kecamatan Amuntai Utara yaitu 18 orang. Responden lainnya yaitu berasal dari Kecamatan Amuntai Tengah adalah sebanyak 3 orang. Dari Kecamatan Babirik berjumlah 10 orang responden, selanjutnya responden yang berasal dari Kecamatan Banjarang adalah 10 orang. Dari Kecamatan Amuntai Selatan berjumlah 9 orang responden. Responden dari Kecamatan Haur Gading adalah 20 orang responden, dan responden yang berasal dari Kecamatan Danau Panggang adalah 13 orang responden.

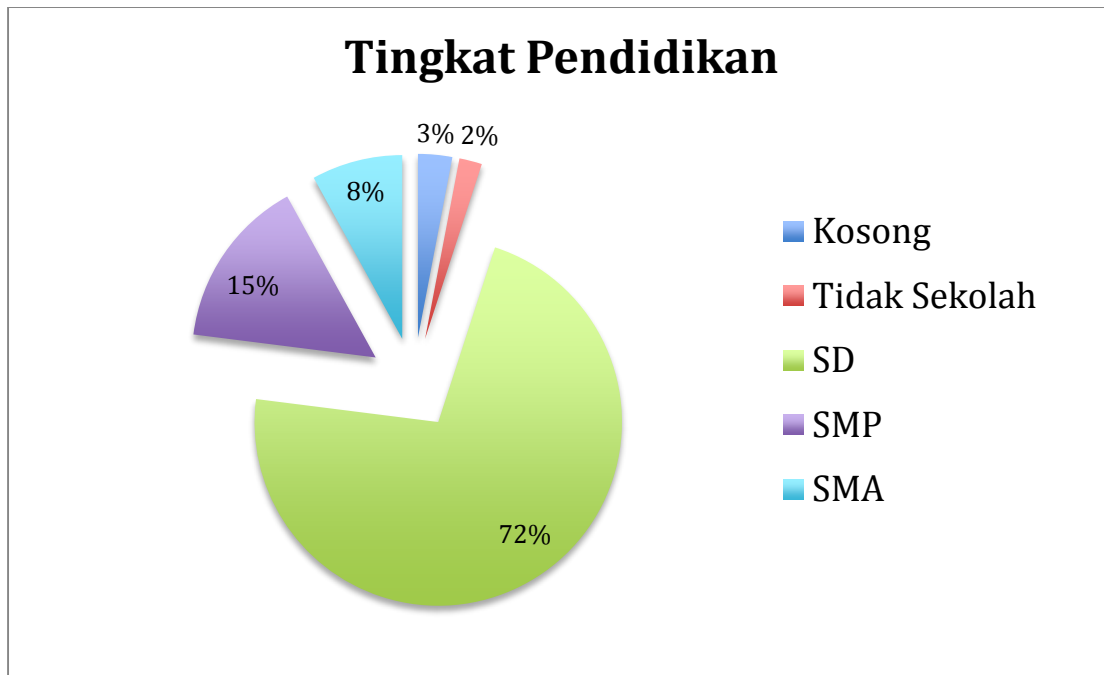
Dalam survey kultur kemiskinan yang dilakukan, responden dari Kecamatan Paminggir tidak bisa ditemui dan terdapat juga responden dari Kecamatan Paminggir yang tidak bersedia diwawancara. Dari kajian yang ada diketahui bahwa jumlah responden yang paling banyak untuk diwawancara adalah responden dari Kecamatan Haur Gading yaitu sebanyak 20 responden. Selanjutnya, responden dari Amuntai Utara adalah sebanyak 18 orang. Kecamatan yang memiliki jumlah responden yang paling sedikit adalah Kecamatan Amuntai Tengah yaitu sebanyak 3 responden.

Selanjutnya kecamatan yang memiliki jumlah responden yang paling sedikit kedua adalah Kecamatan Sungai Pandan yaitu sebanyak 7 orang dan Kecamatan Amuntai Selatan yaitu sebanyak 9 orang. Total seluruh responden pada survey kultur kemiskinan ini adalah sebanyak 100 responden. Jumlah responden di tiap kecamatan tersebut menunjukkan bahwa responden untuk mengidentifikasi kemiskinan kultural di Kabupaten Hulu Sungai Utara telah tersebar dengan baik.

Apabila dilihat dari interval usia, responden survey kultur kemiskinan berada pada rentang usia yang dibagi dalam beberapa interval yaitu: 1) interval umur 21 tahun sampai dengan 30 tahun sebanyak 9 responden; 2) interval umur 31 sampai dengan 40 tahun sebanyak 24 responden; 3) interval umur 41 sampai dengan 50 tahun sebanyak 25 responden; 4) interval umur 51 sampai dengan 60 tahun sebanyak 40 responden; 5) responden yang berumur lebih dari 60 tahun sebanyak 2 responden.

Hasil survey menunjukkan bahwa jumlah responden yang paling banyak adalah responden yang berumur 51-60 tahun. Hal ini dikarenakan jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang terkategori miskin berada pada rentang umur yang cukup tua yaitu dalam interval 51-60 tahun. Kemiskinan kultural yang melanda pada penduduk berusia tua akan lebih sulit dihilangkan dibandingkan kemiskinan kultural yang melanda pada penduduk yang berusia lebih muda. Berkaitan dengan kultur kemiskinan maka yang perlu dilakukan adalah mencegah terjadinya transfer kemiskinan kultural dari generasi tua kepada generasi muda.

Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan terdiri dari responden yang tidak bersekolah sampai dengan responden yang memiliki tingkat pendidikan SMA. Responden yang tidak mengenyam pendidikan adalah sebanyak 2 (dua) responden, responden yang mengenyam pendidikan SD/MI adalah sebanyak 72 (tujuh puluh dua) responden. Selanjutnya, survey juga dilakukan terhadap responden yang berpendidikan SMP yaitu sebanyak 15 (lima belas) orang dan pendidikan SMA sebanyak 8 (delapan) orang. Meskipun demikian, terdapat juga responden yang tidak menjawab dan menginformasikan tingkat pendidikannya yaitu sebanyak 3 (tiga) responden. Karakteristik tingkat pendidikan responden digambarkan pada Gambar 4.1 sebagai berikut.



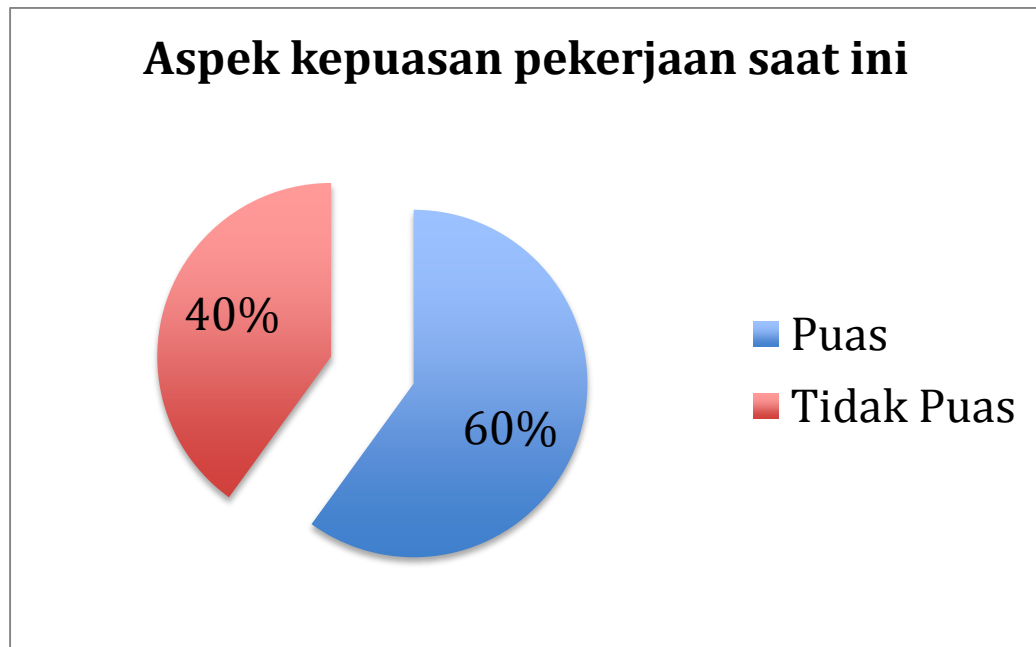
Gambar 4.4. Tingkat Pendidikan Responden Survey Kemiskinan Kultural

Sumber: survey kemiskinan (2018) diolah

Dari informasi tersebut dapat diketahui bahwa semakin rendah tingkat pendidikan maka responden semakin banyak. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah masyarakat miskin secara umum berada pada tingkat pendidikan yang rendah. Dari hasil survei kemiskinan kultural, diketahui bahwa karakteristik responden berdasarkan jenis pekerjaan antara lain adalah pengrajin anyaman, peternak, pedagang, petani, nelayan, buruh, ibu rumah tangga, dan penjahit. Responden yang paling banyak ditemui adalah memiliki profesi sebagai nelayan yaitu sebanyak 25 responden. Setiap responden yang terkategori sebagai masyarakat miskin diberikan beberapa pertanyaan untuk mengidentifikasi eksistensi kultur kemiskinan di masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara khususnya.

Identifikasi terhadap kultur kemiskinan dilihat dalam beberapa aspek, yaitu aspek kepuasan atas pekerjaan saat ini, aspek upaya/strategi untuk mengubah kehidupan meraih cita-cita, aspek kepuasan atas penghasilan saat ini, aspek tingkat kepuasan penghasilan, aspek perasaan sebagai orang miskin, aspek keinginan mencapai kehidupan yang lebih baik, aspek harapan terhadap anak, aspek usaha dan keinginan untuk mengikuti pelatihan, aspek (alasan) kemauan untuk mengikuti pelatihan, aspek upaya ke depan, dan aspek kepercayaan terhadap pendidikan.

Apabila dilihat dari aspek kepuasan atas pekerjaan saat ini terdapat 60% responden yang puas dengan pekerjaannya saat ini dan 40% responden lainnya menyatakan tidak puas dengan pekerjaannya saat ini.



Gambar 4.5. Persepsi terkait Kepuasan terhadap Pekerjaan Sekarang

Sumber: survey kemiskinan (2018) diolah

Identifikasi terhadap upaya responden mengubah kehidupannya menjadi lebih baik digambarkan dalam Gambar 4.6. terdapat 32% responden yang tidak mengetahui apa yang harus dilakukan untuk mengubah kehidupannya menjadi lebih baik. Hasil survey yang ada juga menunjukkan bahwa terdapat 35% responden yang menghendaki untuk tetap pada pekerjaan sekarang namun menaruh harapan pada kebijakan pemerintah. Selanjutnya terdapat 33% responden yang menghendaki pekerjaan lainnya.

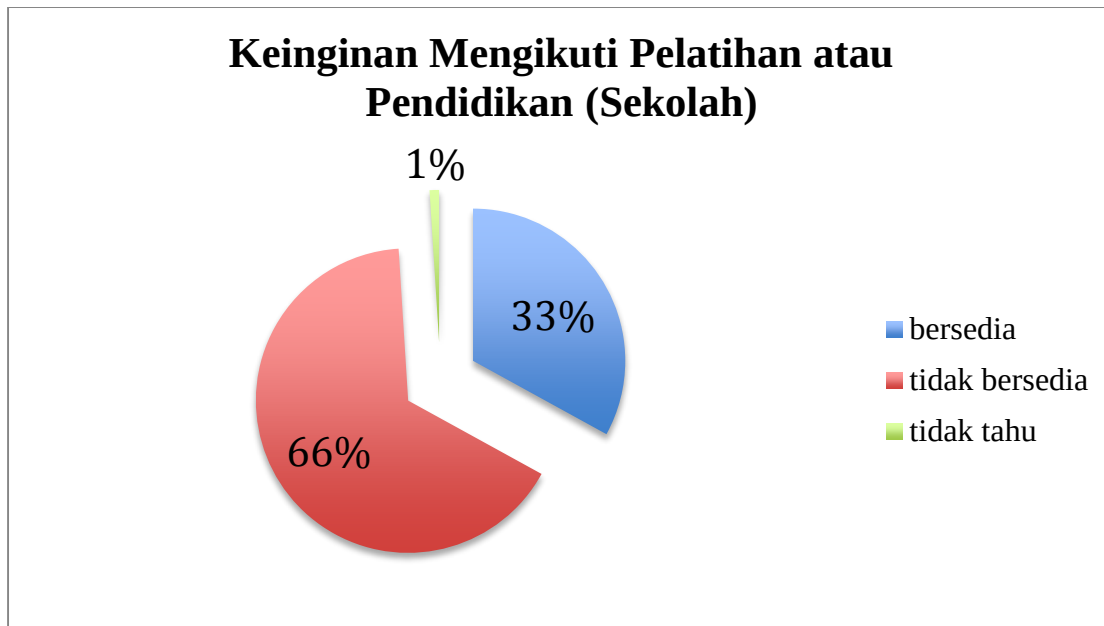


Gambar 4.6. Upaya untuk Mengubah Kehidupan yang Lebih Baik

Sumber: survey kemiskinan (2018) diolah

Apabila ditinjau dari aspek kepuasan penghasilan dapat diketahui bahwa terdapat 56% responden yang merasa puas dengan penghasilannya saat ini meskipun mereka dikategorikan miskin. Sisanya terdapat 44% responden yang menyatakan tidak puas dengan penghasilannya saat ini. Apabila dilihat dari perspektif responden terhadap kepuasan penghasilan maka dapat diketahui bahwa terdapat 30 responden yang menyatakan puas atas penghasilan yang dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga/keluarga, 1 responden menyatakan akan puas dengan penghasilan Rp. 1.500.000 per bulan, 3 responden menyatakan akan puas dengan penghasilan Rp. 2.000.000 per bulan, 3 responden menyatakan akan puas dengan penghasilan Rp. 3.000.000 per bulan, dan 2 responden menyatakan akan puas dengan penghasilan Rp. 5.000.000 per bulan. Angka tersebut dapat dikatakan cukup kecil dibandingkan dengan kebutuhan keluarga yang sangat layak. Hal ini mengindikasikan bahwa individu miskin kurang memiliki keinginan yang cukup tinggi untuk memperbaiki kehidupannya. Meskipun demikian, semua responden yang ditemui dalam survey ini menyatakan bahwa mereka bukan orang miskin baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Identifikasi terhadap aspek usaha dan keinginan untuk mengikuti pelatihan atau pendidikan sekolah yang lebih tinggi agar kehidupannya menjadi lebih baik, ditunjukkan pada Gambar 3.7 sebagai berikut.



Gambar 4.7. Keinginan untuk Mengikuti Pelatihan atau Pendidikan Sekolah

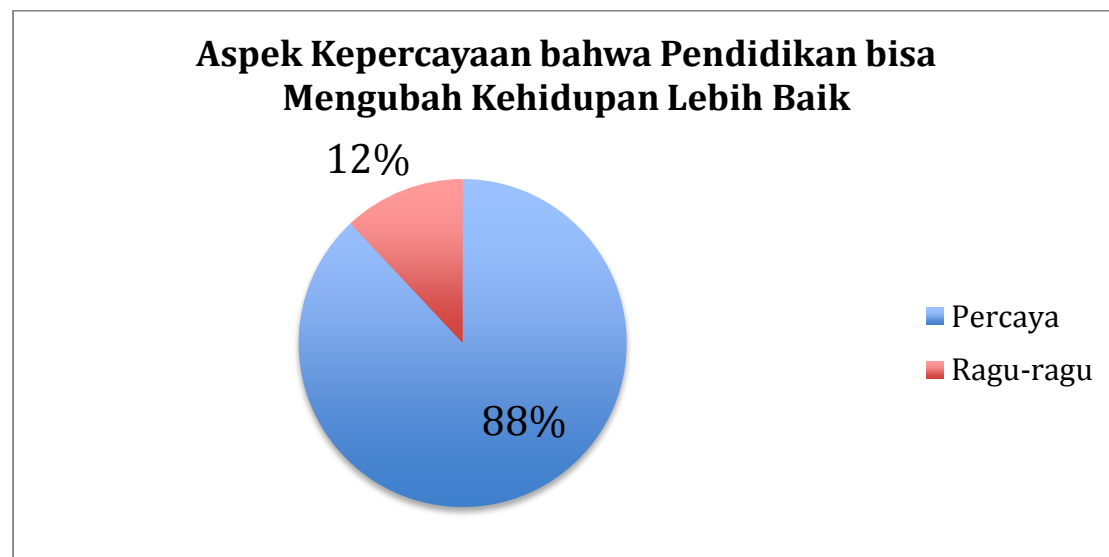
Sumber: survey kemiskinan (2018) diolah

Gambar 4.7 menunjukkan bahwa terdapat 33% responden yang bersedia mengikuti pelatihan atau melanjutkan pendidikan sekolah. Terdapat 66% responden lainnya menyatakan tidak bersedia, dan 1% responden menyatakan tidak tahu. Setelah identifikasi atas ketersediaan mengikuti pelatihan, selanjutnya adalah mengidentifikasi secara mendalam alasan bagi mereka yang tidak ingin untuk mengikuti pelatihan keterampilan dan pelatihan lainnya. Aspek alasan ketidakmauan untuk mengikuti pelatihan atau alasan responden tidak bersedia mengikuti pelatihan antara lain adalah: tergantung pelatihannya (11 responden), faktor usia (38 responden), tidak ada waktu (7 responden), dan tidak tahu (18 responden). Hal yang cukup menarik dalam penelitian ini antara lain bahwa masih terdapat responden yang tidak tahu dengan kehidupannya dan perencanaan di masa mendatang.

Aspek lainnya yang diidentifikasi selanjutnya adalah aspek upaya ke depan oleh rumah tangga miskin untuk mencapai peningkatan kehidupannya. Hasil survey menunjukkan bahwa 68 responden menyatakan akan berusaha lebih keras untuk kehidupan lebih baik, 2 responden menyatakan bahwa akan bekerja dan berdoa, 10 responden lainnya menjawab bahwa akan mencari usaha yang lebih jelas, 18 responden menyatakan tidak tahu, dan 2 responden lainnya berharap pada anaknya. Pada aspek ini dapat diidentifikasi bahwa secara umum responden berkeinginan untuk berusaha dengan lebih baik. Namun, terdapat beberapa responden yang masih tidak

tahu atas upayanya di masa mendatang dan mengharapkan anaknya. Pengharapan orang tua miskin kepada anaknya memberikan beban tersendiri bagi anak keluarga miskin yang dikhawatirkan akan menyebabkan transfer kemiskinan antar generasi. Maka dari itu, salah satu solusi untuk kasus ini adalah upaya pencapaian tingkat pendidikan yang lebih baik, sebagaimana Duflo (2001) menyatakan bahwa pendidikan selama ini dipercaya dapat memutus lingkaran kemiskinan yang terjadi antar generasi.

Identifikasi selanjutnya terhadap aspek kepercayaan bahwa pendidikan bisa mengubah kepada kehidupan ke arah yang lebih baik, dapat dilihat pada Gambar 4.8 sebagai berikut.



Gambar 4.8. Keinginan untuk Mengikuti Pelatihan atau Pendidikan Sekolah

Sumber: survey kemiskinan (2018) diolah

Dari identifikasi terhadap aspek tersebut terdapat 88% responden yang menyatakan setuju dan meyakini bahwa pendidikan dapat mengubah kepada kehidupan yang lebih baik. Selanjutnya, sebanyak 12% responden masih menyatakan ragu-ragu bahwa pendidikan mampu mengubah kepada kehidupan yang lebih baik. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara khususnya agar dapat ditindaklanjuti untuk masa depan yang lebih baik dan penurunan tingkat kemiskinan dari tahun ke tahun. Perlunya edukasi kepada

masyarakat bahwa tingkat pendidikan mampu memutus lingkaran kemiskinan pada generasi selanjutnya.

Kesimpulan dari penelitian yang ada bahwa kultur kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara antara lain adalah kurangnya motivasi untuk maju, kurangnya tanggung jawab untuk diri sendiri, kurang rajin dalam upaya meraih kehidupan yang lebih baik, sikap mudah putus asa, dan hidup tanpa harapan, serta tidak memiliki strategi yang baik dalam meraih cita-cita. Berdasarkan penelitian yang ada, kultur-kultur kemiskinan ini dapat diketahui dari hasil survey antara lain adalah: secara rata-rata responden menyatakan puas dengan pekerjaan dan penghasilannya saat ini padahal masih terkategori penduduk berpendapatan rendah, secara umum responden tidak tahu apa yang harus dilakukan jika mereka tidak merasa puas dengan penghasilannya dan berharap dengan kebijakan pemerintah saja.

Penelitian yang ada menemukan bahwa beberapa kultur kemiskinan antara lain yaitu individu miskin memiliki pengharapan yang besar terhadap generasi berikutnya (anak) sehingga hal ini dapat menimbulkan kemiskinan antar generasi. Anak menjadi terbebani, maka dari itu pentingnya meningkatkan pendidikan anak rumah tangga miskin sehingga dapat menanggung beban yang diberikan orang tuanya dan tidak jatuh ke dalam kemiskinan juga. Penelitian yang ada juga menemukan bahwa masih terdapat masyarakat yang tidak bersedia mengikuti pelatihan keterampilan dikarenakan beberapa faktor, yaitu faktor usia, tidak punya waktu, tergantung jenis pelatihannya, dan terdapat juga yang menyatakan tidak tahu.

Dari hasil survey juga diketahui bahwa di Kabupaten Hulu Sungai Utara terdapat fenomena pernikahan dini yang cukup tinggi. Hal ini dapat dikarenakan persepsi terhadap pendidikan yang masih belum baik. Dengan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan dapat menyebabkan adanya fenomena pernikahan dini dan tingkat perceraian yang cukup tinggi. Kurangnya motivasi untuk melanjutkan pendidikan menyebabkan masyarakat memilih untuk menikah dini yang memicu tingkat perceraian. Penelitian yang ada juga menemukan bahwa terdapat 12% responden yang masih memiliki keraguan apakah pendidikan mampu mengubah kehidupan menjadi lebih baik. Adanya fenomena tersebut mengindikasikan perlu adanya program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara perlu dibagi dalam beberapa *cluster* (kelompok). Pengelompokan masyarakat miskin berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan berdasarkan beberapa aspek yang telah diidentifikasi.

BAB V

Cluster Kemiskinan Kultural di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Hasil penelitian yang ada menyimpulkan bahwa terdapat eksistensi kemiskinan kultural di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dari penelitian yang ada maka responden masyarakat miskin dapat dibagi menjadi beberapa kelompok (*cluster*). Kelompok program penanggulangan kemiskinan dapat dibagi dalam tiga kategori yaitu: a) Kelompok pertama, yang dikategorikan sebagai penerima bantuan dan perlindungan sosial; b) kelompok kedua, yang dikategorikan sebagai penerima program pemberdayaan masyarakat; c) kelompok ketiga, yang dikategorikan sebagai penerima program pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Hasil analisis *cluster* dalam pembagian kelompok masyarakat miskin berdasarkan identifikasi kemiskinan kultural adalah sebagai berikut.

Tabel 5.1. Pengaruh Variabel terhadap Identifikasi *Cluster*

Variabel	Mean Square (Cluster)
Z_score (jenis kelamin)	7,445***
Z_score (umur)	22,456***
Z_score (pekerjaan)	11,367***
Z_score (pendidikan)	22,427***
Z_score (kepuasan atas pekerjaan)	35,569***
Z_score (kepuasan atas penghasilan)	39,630***
Z_score (menginginkan kondisi ekonomi lebih baik)	4,160**
Z_score (kesediaan mengikuti pendidikan/pelatihan)	21,838***
Z_score (persepsi terhadap pendidikan)	1,849

Sumber: survey kemiskinan, diolah

Hasil analisis terhadap identifikasi *cluster* masyarakat miskin di Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan kultur masyarakat menunjukkan bahwa variabel jenis kelamin, umur, pekerjaan, pendidikan, aspek kepuasan terhadap pekerjaan dan penghasilan, aspek kesediaan mengikuti pendidikan/pelatihan berpengaruh signifikan

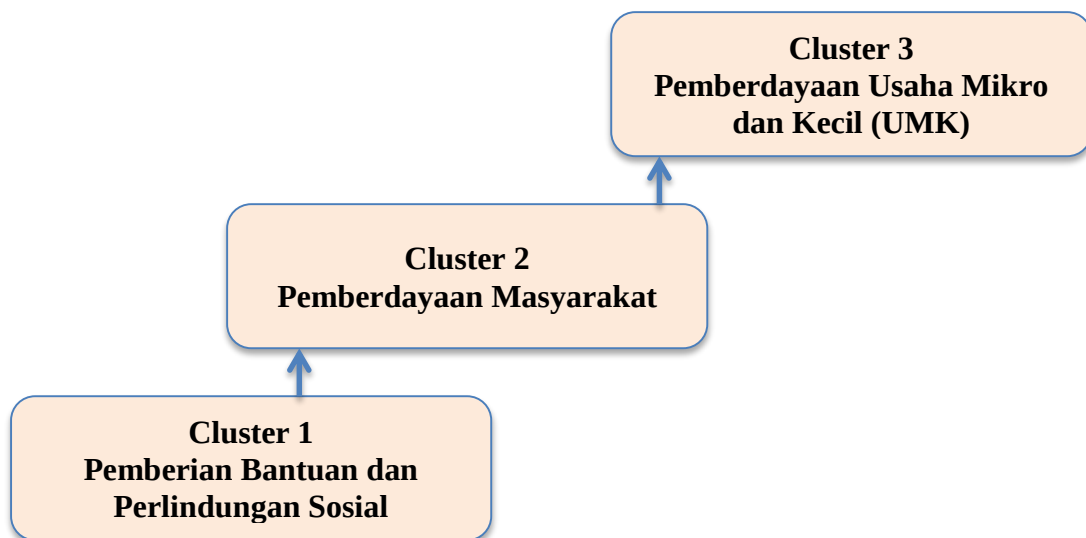
1% terhadap *cluster* yang akan dibentuk. Variabel aspek keinginan terhadap kondisi ekonomi yang lebih baik berpengaruh signifikan 5% terhadap *cluster* yang akan dibentuk. Sedangkan, persepsi terhadap pendidikan bahwa dapat mengubah pendidikan tidak berpengaruh signifikan dalam pembentukan *cluster* masyarakat miskin berdasarkan kultur masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Hasil analisis *cluster* menghasilkan 3 (tiga) kelompok yang memiliki karakteristik berbeda. Kelompok **pertama** merupakan kelompok masyarakat miskin yang tidak memiliki keinginan untuk mengikuti pelatihan, tidak mengetahui apa yang harus dilakukan sebagai upaya untuk mengubah kehidupannya. Kelompok **kedua** adalah kelompok yang menyatakan puas dengan penghasilan 1 sampai dengan 3 juta rupiah, kelompok yang mau mengikuti pelatihan, dan kelompok yang menyetujui bahwa pendidikan dapat mengubah kondisi kehidupan seseorang. Kelompok **ketiga** merupakan kelompok yang mau mengikuti pelatihan, menyetujui bahwa pendidikan dapat mengubah kondisi kehidupan seseorang, dan kelompok yang menginginkan usaha lainnya untuk memajukan kehidupannya, dan kelompok yang memiliki keinginan untuk memiliki penghasilan 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) juta rupiah per bulan. Identifikasi yang tepat atas pengkategorian masyarakat miskin terhadap kelompok-kelompok tersebut dan implementasi kebijakan yang tepat dapat mengurangi persentase kemiskinan, tingkat kedalaman kemiskinan, maupun tingkat keparahan kemiskinan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Dengan adanya 3 (tiga) kelompok yang berbeda tersebut maka formulasi kebijakan yang dapat dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat digambarkan dalam Gambar 5.1. Sebelum pemberian program, perlu dilakukan sosialisasi terhadap pentingnya pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat miskin di Kabupaten Hulu Sungai Utara khususnya. Masyarakat miskin yang tidak mau untuk mengikuti pendidikan/pelatihan, dan masyarakat yang telah berusia tua dan memiliki kelemahan fisik atau non-fisik dapat dimasukkan dalam Program untuk *Cluster 1* yaitu pemberian bantuan dan perlindungan sosial. Sedangkan, masyarakat miskin yang bersedia untuk melanjutkan sekolah atau mengikuti pelatihan dapat diimplementasikan program untuk *cluster 2* dan 3.

Program untuk *cluster 2* adalah Pemberdayaan Masyarakat yaitu upaya untuk memberikan daya kepada masyarakat khususnya masyarakat miskin di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Suharto (2010) menyatakan bahwa proses pemberdayaan masyarakat adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kelompok lemah

masyarakat, dalam hal ini masyarakat miskin di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat memiliki perubahan sosial yaitu masyarakat berdaya, memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat ekonomi, maupun sosial sehingga memiliki kepercayaan diri, dan mandiri dalam kehidupannya.



Gambar 5.1. Formulasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan berdasarkan Kultur Masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Program dalam *cluster* 3 adalah pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Masyarakat miskin dalam kajian ini paling banyak adalah petani, dan pengrajin anyaman. Sebagaimana diketahui bahwa masyarakat dengan pekerjaan petani tidak mudah dalam mendapatkan akses kredit untuk peningkatan usahanya. Hal ini dikarenakan masyarakat petani dianggap tidak memiliki penghasilan yang pasti, karena penghasilan masyarakat petani ditentukan oleh masa panen. Sedangkan, masa panen juga dipengaruhi oleh keadaan cuaca dan hal lain yang dapat menyebabkan kegagalan masa panen. Sehingga, pihak pemberi kredit tidak mudah untuk memberikan akses pinjaman kepada masyarakat petani. Hal yang mirip juga terjadi pada pengrajin anyaman yang mana penghasilannya tidak pasti dan tidak regular. Maka dari itu perlu adanya upaya pemberdayaan usaha mikro dan kecil.

Pemberdayaan yang dapat dilakukan pada masyarakat petani dalam bentuk usaha mikro dan kecil adalah pemberian kredit atau pinjaman kepada masyarakat petani yang tergabung dalam kelompok tani. Pemberian akses terhadap perekonomian bagi usaha mikro dan kecil diharapkan dapat meningkatkan taraf kehidupan bagi kelompok masyarakat miskin yang tergabung dalam usaha mikro dan kecil tersebut. Bagaimanapun, dampak sebuah kebijakan yang diimplementasikan memerlukan waktu yang tidak relatif singkat. Implementasi kebijakan ini dapat dituangkan dalam pembuatan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Agar upaya penanggulangan kemiskinan dapat berjalan optimal, efektif, efisien, terprogram secara terpadu dan berkelanjutan, maka diperlukan peraturan bagi penyelenggara Pemerintah. Perda mengatur strategi penanggulangan kemiskinan. Perda tersebut harus berpedoman terhadap dokumen perencanaan daerah yang ada untuk menjamin keterkaitan, kesinambungan, dan keberlanjutan program. Tujuan penyusunan Perda antara lain adalah:

1. Meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha warga miskin
2. Memperkuat peran warga miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar
3. Mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik dan sosial yang memungkinkan warga miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan
4. Memberikan rasa aman bagi kelompok warga miskin dan rawan miskin
5. Menurunkan jumlah penduduk miskin

Upaya lainnya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan kultur masyarakat adalah dengan mengoptimalkan potensi di setiap kecamatan. Setiap kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki potensi yang berbeda-beda baik dari sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Dilihat dari sisi produktifitas, Kecamatan Danau Panggang memiliki potensi sektor pertanian yaitu padi sawah, jagung, ubi-ubian, sayuran, buahan. Kecamatan Sungai Pandan memiliki potensi padi

sawah, jagung, ubi-ubian, sayuran, buahan. Kecamatan Amuntai Tengah memiliki potensi yaitu padi sawah, jagung, kacang-kacangangan, sayur, dan buah. Kecamatan Banjarang memiliki potensi padi sawah, jagung, kacang-kacangangan, sayur, dan buah. Kecamatan Amuntai Utara memiliki potensi padi sawah, ubi-ubian, sayuran, dan buah-buahan. Kecamatan Haur Gading memiliki potensi padi sawah, jagung, ubi-ubian, dan buah-buahan. Kecamatan Sungai Tabukan memiliki potensi padi sawah, jagung, ubi-ubian, sayuran, buahan. Kecamatan Amuntai Selatan memiliki potensi padi sawah, ubi-ubian, sayuran, dan buah-buahan. Kecamatan Babirik memiliki potensi padi sawah, jagung, ubi-ubian, sayuran, buah-buahan. Sedangkan, Kecamatan Paminggir memiliki potensi padi sawah, dan buah-buahan.

Berdasarkan sektor peternakan, Kecamatan Danau Panggang memiliki potensi ayam ras pedaging, ayam buras, itik, ikan rawa, ikan sungai. Kecamatan Sungai Pandan memiliki potensi ayam ras pedaging, ayam buras, itik. Kecamatan Amuntai Tengah memiliki potensi ayam ras pedaging, ayam buras, itik, ikan. Kecamatan Paminggir memiliki potensi kerbau, dan ikan rawa yang maksimal di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kecamatan Sungai Tabukan memiliki potensi itik, ayam yang masih belum maksimal. Kecamatan Banjarang memiliki potensi ayam buras, itik. Kecamatan Amuntai Utara memiliki potensi ayam ras pedaging, ayam buras, itik, ikan. Kecamatan Haur Gading memiliki potensi ayam ras pedaging, ayam buras, itik. Kecamatan Amuntai Selatan: ayam ras pedaging, ayam buras, itik, ikan. Kecamatan Paminggir memiliki potensi kerbau dan ikan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai dokumen induk perencanaan pembangunan daerah juga telah disusun untuk menanggulangi permasalahan kemiskinan. Beberapa program OPD untuk jangka menengah di dalam RPJMD terkait dengan strategi penanggulangan kemiskinan akan disesuaikan dengan permasalahan kemiskinan pada tiap *cluster*. Berikut merupakan program dan indikator program dalam RPJMD yang mendukung penanggulangan kemiskinan kultural berdasarkan pembagian kluster dalam kajian ini.

Tabel 5.1. Program dan Indikator Program dalam RPJMD yang Mendukung Penanggulangan Kemiskinan Kultural Berdasarkan Pembagian Kluster

NO	CLUSTER 1			CLUSTER 2			CLUSTER 3		
	Pemberian Bantuan dan Perlindungan Sosial			Pemberdayaan Masyarakat			Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK)		
	Program	Indikator	OPD	Program	Indikator	OPD	Program	Indikator	OPD
1	Program Dukungan Pelayanan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial berjalan lancar	Bagian Kesra	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase keluarga fakir miskin yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal dan fungsi sosialnya	Dinas Sosial	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase Fakir Miskin yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana pendukung usaha (%)	Dinas Sosial
2	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan	Persentase pelaksanaan penyaluran bantuan bagi korban bencana alam dan bencana sosial (%)	Dinas Sosial	Program Pelayanan Rastra, PKH dan BPJS Kesehatan	Persentase pelaksanaan koordinasi pendistribusian rastra dan integrasi bantuan pelayanan BPJS kesehatan (%)	Dinas Sosial	Program Pelayanan Rastra, PKH dan BPJS Kesehatan	Persentase pelaksanaan koordinasi pendistribusian rastra dan integrasi bantuan pelayanan BPJS kesehatan (%)	Dinas Sosial

3	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	Persentase pelaksanaan penyaluran bantuan bagi korban bencana alam dan bencana sosial (%)	Dinas Sosial	Program Pelayanan Raskin	Persentase pelaksanaan koordinasi pendistribusian raskin (%)	Dinas Sosial	Program Pelayanan Raskin	Persentase pelaksanaan koordinasi pendistribusian raskin (%)	Dinas Sosial
4	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi Lansia, orang dengan disabilitas dan orang terlanter	Persentase Lansia, orang dengan disabilitas, dan orang terlanter yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal dan fungsi sosialnya (%)	Dinas Sosial	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk miskin	Dinas Kesehatan	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk miskin	Dinas Kesehatan
5	Program Pelayanan Rastra, PKH dan BPJS Kesehatan	Persentase pelaksanaan koordinasi pendistribusian rastra dan integrasi bantuan pelayanan BPJS	Dinas Sosial	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Cakupan Pelayanan Kesehatan dasar masyarakat miskin	Dinas Kesehatan	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Cakupan Pelayanan Kesehatan dasar masyarakat miskin	Dinas Kesehatan

		kesehatan (%)							
6	Program Pembinaan panti asuhan/jompo	Persentase panti asuhan yang dipelihara (%)	Dinas Sosial	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	DPMD	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Persentase peningkatan usahawan muda	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata
7	Program Pembinaan anak terlantar	Persentase anak terlantar yang terbina (%)	Dinas Sosial	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Angka Kepala Keluarga Perempuan Miskin	DP3A	Program Peningkatan dan Pemberdayaan Penyuluh Pertanian	Persentase bina cakupan kelompok tani	Dinas Pertanian
8	Program Pelayanan Raskin	Persentase pelaksanaan koordinasi pendistribusian raskin (%)	Dinas Sosial				Program Pengembangan Sistem Penyuluhan	Jumlah Kelompok yang dibina	Dinas Perikanan
9	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk miskin	Dinas Kesehatan				Program Pengembangan Usaha Kecil Menengah Perikanan	Jumlah hasil olahan perikanan	Dinas Perikanan

10	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Cakupan Pelayanan Kesehatan dasar masyarakat miskin	Dinas Kesehatan				Program Peningkatan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah hasil olahan perikanan	Dinas Perikanan
11	Program Peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Persentase peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Dinas Kesehatan				Program Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Perikanan	persentasi kelompok usaha perikanan yang dibina (%)	Dinas Perikanan
12	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Angka Kepala Keluarga Perempuan Miskin	DP3A				Program Optimalisasi Usaha Perikanan	Jumlah pelaku usaha perikanan (orang)	Dinas Perikanan
13							Program Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM	Pertumbuhan Tenaga Kerja UMKM (%)	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi
14							Program Pembinaan Pedagang Kaki lima dan asongan	Persentase PKL dan Asongan Yg Dibina	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi

									i
15							Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	DPTSP

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dari hasil identifikasi kultur kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka dapat disimpulkan bahwa kultur kemiskinan yang terdapat pada masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan hasil survey antara lain adalah: kurangnya motivasi untuk maju, kurangnya tanggung jawab untuk diri sendiri, kurang rajin dalam upaya meraih kehidupan yang lebih baik, sikap mudah putus asa, dan hidup tanpa harapan, serta tidak memiliki strategi yang baik dalam meraih cita-cita.

Berdasarkan kultur masyarakat maka masyarakat miskin di Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dibagi menjadi tiga *cluster* atau kelompok. Kelompok pertama merupakan kelompok masyarakat miskin yang tidak memiliki keinginan untuk mengikuti pelatihan, tidak mengetahui apa yang harus dilakukan sebagai upaya untuk mengubah kehidupannya. Kelompok kedua adalah kelompok yang menyatakan puas dengan penghasilan 1 sampai dengan 3 juta rupiah, kelompok yang mau mengikuti pelatihan, dan kelompok yang menyetujui bahwa pendidikan dapat mengubah kondisi kehidupan seseorang. Kelompok ketiga merupakan kelompok yang mau mengikuti pelatihan, menyetujui bahwa pendidikan dapat mengubah kondisi kehidupan seseorang, dan kelompok yang menginginkan usaha lainnya untuk memajukan kehidupannya, dan kelompok yang memiliki keinginan untuk memiliki penghasilan 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) juta rupiah per bulan. Identifikasi yang tepat atas pengkategorian masyarakat miskin terhadap kelompok-kelompok tersebut dan implementasi kebijakan yang tepat dapat mengurangi persentase kemiskinan, tingkat kedalaman kemiskinan, maupun tingkat keparahan kemiskinan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sedangkan, variabel-variabel yang berpengaruh signifikan dalam pembentukan kelompok masyarakat miskin ini adalah variabel jenis kelamin, umur, pekerjaan, pendidikan, aspek kepuasan terhadap pekerjaan dan penghasilan, aspek kesediaan mengikuti pendidikan/pelatihan, dan variabel aspek keinginan terhadap kondisi ekonomi yang lebih baik.

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang diakibatkan oleh kultur masyarakat maka perlu dilakukan program penanggulangan kemiskinan yang

berbeda-beda yang terbagi dalam program penanggulangan kemiskinan untuk tiga kelompok yaitu: a) Kelompok yang dikategorikan sebagai penerima bantuan dan perlindungan sosial; b) kelompok yang dikategorikan sebagai penerima program pemberdayaan masyarakat; c) kelompok yang dikategorikan sebagai penerima program pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Selanjutnya, agar upaya penanggulangan kemiskinan dapat berjalan optimal, efektif, efisien, terprogram secara terpadu dan berkelanjutan, maka diperlukan peraturan bagi penyelenggara Pemerintah. Perda mengatur strategi penanggulangan kemiskinan. Perda tersebut harus berpedoman terhadap dokumen perencanaan daerah yang ada untuk menjamin keterkaitan, kesinambungan, dan keberlanjutan program.

Kebijakan lainnya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam upaya penanggulangan kemiskinan berdasarkan kultur masyarakat adalah optimalisasi potensi di setiap kecamatan. Setiap kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki potensi yang berbeda-beda baik dari sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abraham, R. A. & Kumar, K.S.K. (2008). Multidimensional Poverty and Vulnerability. *Economic and Political Weekly* 43(20), 79-87.
- Arndt, C., M.A. Hussain, E.S. Jones, V. Nhate, F. Tarp, & J. Thurlow. (2012). Explaining the Evolution of Poverty. *American Journal of Agricultural Economics* 94(4), 854-872.
- Arsyad, Lincoln. (2016). *Ekonomika Pembangunan*. Edisi 5, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Asselin, Louis-Marie. (2009). Analysis of Multidimensional Poverty: theory and case studies. *Economic Studies in Equality, Social Exclusion and Well-Being*. Volume number 7. New York: Springer.
- Astika, K.S. (2010). Budaya Kemiskinan di Masyarakat: Tinjauan Kondisi Kemiskinan dan Kesadaran Budaya Miskin di Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 1(1), 20-26.
- Bradshaw, T.K. (2006). Theories of Poverty and Anti-Poverty Programs in Community Development. RPRC Working Paper No. 06-05.
- Branch, E.H & M.L. Scherer. (2013). Mapping the Intersections in the Resurgence of the Culture of Poverty. *Race, Gender, and Class* 20(3-4), 346-358.
- Chandhoke, Neera. (2012). "Why People Should Not Be Poor?". *Economic and Political Weekly* 47(14): 41-50.
- Duflo, Esther, (2001). Schooling and Labor Market Consequences of School Construction in Indonesia: Evidence from an Unusual Policy Experiment. *the American Economic Review*. 91(4), 795-813.
- Gottschalk, P. dan S. Danziger (1985). A Framework for Evaluating the Effects of Economic Growth and Transfers on Poverty. *American Economic Review* 75, 153-161.
- Houghton, J. & Khandker, S.R. (2009). Handbook on Poverty + Inequality. Washington, DC: the World Bank.
- Kuncoro, M. (2006). *Ekonomi Pembangunan: Teori Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Meier, G.M. (1995). *Leading issues in economic development*, 6th ed. Oxford: Oxford University Press.
- Northrop, E.M. (1988). Economic Growth and Poverty Reductions: Important Mitigating Factors. *Eastern Econommic Journal* 14(4), 349-356.
- Ras, Atma. (2013). Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan. *Socius* XIV, 56-63.
- Ravallion, Martin. (1998). "Poverty Lines in Theory and Practice", the World Bank, Washington, DC.
- Spencer-Wood, S.M. & C.N Matthews. (2011). "Impoverishment, Criminalization, and the Culture of Poverty". *Historical Archaeology* 45(3): 1-10.
- Suharto, E. (2010). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama.
- Sumodiningrat, Gunawan. (1999). *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial*. Jakarta: PT. Gramedia.